



MODUL  
TEMA 14



# Menjalin Persahabatan Dunia

SEJARAH INDONESIA PAKET C SETARA SMA/MA



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah  
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus  
Tahun 2020



MODUL  
TEMA 14



# Menjalin Persahabatan Dunia

SEJARAH INDONESIA PAKET C SETARA SMA/MA KELAS XII



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah  
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus  
Tahun 2020

Sejarah Indonesia Paket C Setara SMA/MA Kelas XII  
Modul Tema 14 : Menjalin Persahabatan Dunia

- **Penulis:** Dra. Rukayah
- **Editor:** Dr. Samto; Dr. Subi Sudarto  
Dra. Maria Listiyanti; Dra. Suci Paresti, M.Pd.; Apriyanti Wulandari, M.Pd.
- **Diterbitkan oleh:** Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus–Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

vi+ 58 hlm + ilustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

**Modul Dinamis:** Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

## Kata Pengantar

Pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif memberikan layanan kepada masyarakat yang karena kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi dan psikologis tidak berkesempatan mengikuti pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan formal. Kurikulum pendidikan kesetaraan dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah hasil revisi berdasarkan peraturan Mendikbud No.24 tahun 2016. Proses adaptasi kurikulum 2013 ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan adalah melalui proses kontekstualisasi dan fungsionalisasi dari masing-masing kompetensi dasar, sehingga peserta didik memahami makna dari setiap kompetensi yang dipelajari.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip flexible learning sesuai dengan karakteristik peserta didik kesetaraan. Penerapan prinsip pembelajaran tersebut menggunakan sistem pembelajaran modular dimana peserta didik memiliki kebebasan dalam penyelesaian tiap modul yang di sajikan. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah perlunya disusun modul pembelajaran pendidikan kesetaraan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dan melakukan evaluasi ketuntasan secara mandiri.

Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengembangkan modul pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan melibatkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru dan tutor pendidikan kesetaraan. Modul pendidikan kesetaraan disediakan mulai paket A tingkat kompetensi 2 (kelas 4 Paket A). Sedangkan untuk peserta didik Paket A usia sekolah, modul tingkat kompetensi 1 (Paket A setara SD kelas 1-3) menggunakan buku pelajaran Sekolah Dasar kelas 1-3, karena mereka masih memerlukan banyak bimbingan guru/tutor dan belum bisa belajar secara mandiri.

Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru, tutor pendidikan kesetaraan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, 1 Juli 2020  
Plt. Direktur Jenderal



Hamid Muhammad

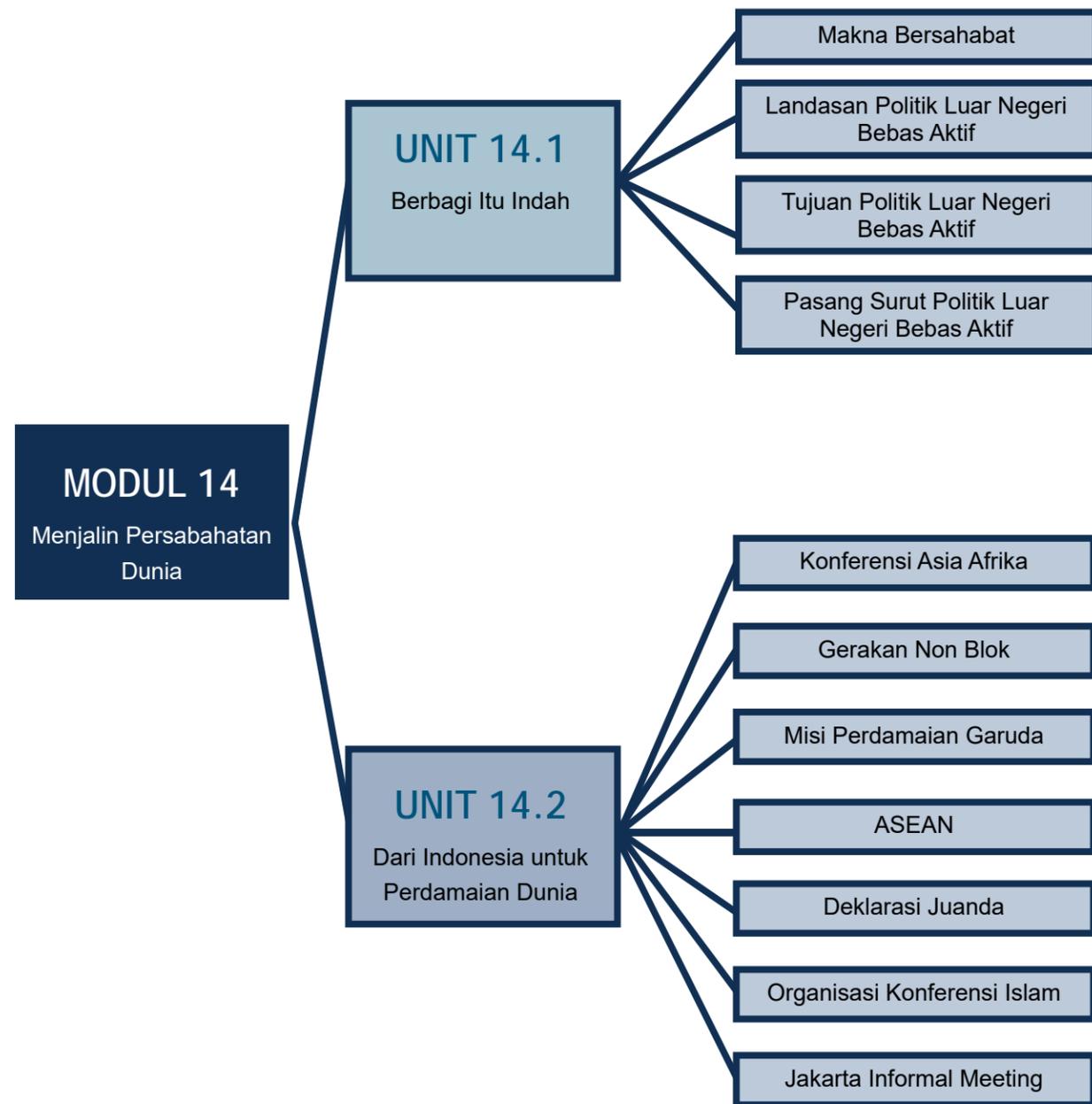
## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Gambar .....	v
PETA KONSEP .....	vi
<b>MODUL 14 MENJALIN PERSAHABATAN DUNIA.....</b>	<b>1</b>
Petunjuk Penggunaan Modul dan Kriteria Ketuntasan Pembelajaran .....	1
Tujuan Pembelajaran Modul .....	2
Pengantar Modul.....	2
<b>UNIT 1 BERBAGI ITU INDAH.....</b>	<b>4</b>
MARI BELAJAR – 14.1 .....	4
A. Makna Bersahabat.....	4
B. Landasan Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif .....	7
C. Tujuan Politik Luar Negeri.....	12
D. Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif dari Masa ke Masa.....	13
Penugasan 14.1.1 .....	18
<b>UNIT 2 DARI INDONESIA UNTUK PERDAMAIAN DUNIA .....</b>	<b>20</b>
MARI BELAJAR – 14.2 .....	20
A. Konferensi Asia Afrika (KAA) .....	20
B. Gerakan Non-Blok (GNB) .....	23
C. Misi Pemeliharaan Perdamaian Garuda .....	25
D. Pembentukan Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).....	28
E. Deklarasi Juanda .....	30
F. Organisasi Konferensi Islam (OKI) .....	33
G. Jakarta Informal Meeting .....	34
Penugasan 14.2.1 .....	37
Penugasan 14.2.2.....	38
Rangkuman.....	39
Saran Referensi .....	40
Soal Latihan .....	40
Penilaian .....	43
Kriteria Pindah / Lulus Modul .....	55
Daftar Pustaka .....	56
Glosarium .....	57
Tentang Penulis .....	58

## Daftar Gambar

Gambar 14.1.1	Mohammad Hatta .....	7
Gambar 14.1.2	Ir Soekarno dan John F. Kennedy .....	8
Gambar 14.1.3	Soeharto dan Richard M Nixon.....	9
Gambar14.1.4	Presiden Era Reformasi .....	10
Gambar: 14.2.1	Gedung Merdeka saat Pelaksanaan KAA .....	21
Gambar 14.2.2	Soekarno, M.Hatta, dan tokoh KAA.....	22
Gambar 14.2.3	Presiden Soekarno berpidato pada KTT I GNB di Beograd .	23
Gambar 14.2.4	Lima Tokoh Pendiri Gerakan Non Blok .....	24
Gambar 14.2.5	Pengiriman Misi Garuda .....	25
Gambar 14.2.6	Peta Terusan Suez dari Port Said di utara sampai Suez di selatan.....	27
Gambar 14.2.7	Lambang dan Bendera Negara-Neraga ASEAN .....	28
Gambar 14.2.8	Penandatanganan Deklarasi Bangkok.....	28
Gambar14.2.9	Kantor ASEAN di Jakarta.....	30
Gambar 14.2.10	Djuanda Kartawidjaja .....	31
Gambar 14.2.11	Wilayah Indonesia sesuai Deklarasi Djuanda 1957 .....	32
Gambar 14.2.12	Lambang OKI.....	33
Gambar 14.2.13	Tugu Persahabatan RI-Kamboja di Kampong Thom .....	35

# PETA KONSEP



# MENJALIN PERSAHABATAN DUNIA

## Petunjuk Penggunaan Modul dan Kriteria Ketuntasan Pembelajaran

Salam Jumpa....

Warga belajar yang budiman, selamat mempelajari Modul 14 Mata Pelajaran Sejarah Indonesia Program Paket C Tingkat VI setara kelas XII dengan judul Menjalin Persahabatan Dunia. Sebelum mempelajari modul 14 ini, bacalah petunjuk berikut ini!

	Anda dapat mempelajari keseluruhan modul ini dengan cara yang berurutan agar memperoleh pemahaman yang utuh.
	Pelajari dan pahami modul ini secara bertahap mulai dari bagian awal sampai dengan bagian akhir, sebab masing-masing bagian saling berkaitan.
	Jangan memaksakan diri pindah ke bagian lain sebelum benar-benar menguasai bagian yang sedang dicermati pada modul ini.
	Baca tujuan yang diharapkan setelah mempelajari modul dan cermati pengantar modul agar mengetahui garis besar isi modul ini.
	Setiap unit modul dilengkapi dengan latihan dan penugasan. Latihan dapat dikerjakan secara individu maupun kelompok, sedangkan penugasan dikerjakan secara individu.

	Penugasan menjadi alat ukur tingkat penguasaan Anda terhadap materi yang ada di dalam modul ini.
	Jika Anda belum menguasai 75% dari setiap unit, maka Anda dapat mempelajari ulang materi yang tersedia dalam modul ini.
	Tanyakan dan konsultasikan kesulitan yang Anda temui kepada Tutor setelah hasil penugasan Anda dinilai oleh Tutor Anda

## Tujuan Pembelajaran Modul

Setelah membaca dan mempelajari modul ini, secara umum Anda diharapkan mampu:

1. Mengaktualisasikan makna persahabatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
2. Menganalisis dinamika politik luar negeri bebas aktif Indonesia dari masa ke masa
3. Mengevaluasi peran dan kontribusi Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia dalam bentuk hubungan bilateral, multilateral maupun melalui keterlibatan dalam berbagai organisasi regional maupun internasional, antara lain: Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok, Pengiriman Misi Perdamaian Garuda, ASEAN, Organisasi Konferensi Islam, Deklarasi Djuanda, Jakarta Informal Meeting.
4. Mengambil hikmah dari penerapan politik luar negeri bebas aktif dan partisipasi aktif Indonesia dalam percaturan politik dunia.
5. Mengevaluasi bentuk kerja sama antarnegara dalam kajian hubungan internasional di masa kini dan memprediksinya di masa depan

## Pengantar Modul

Apa yang terlintas dalam pikiran Anda, ketika ada istilah ‘Menjalin Persahabatan Dunia’?

Tentu masing-masing orang mempunyai pemahaman dan pemaknaan sendiri terhadap istilah tersebut, bahkan Anda mungkin memiliki persepsi yang berbeda juga. Namun secara umum barangkali ada kesepakatan bahwa istilah tersebut bermakna sebagai suatu upaya untuk mengadakan jalinan atau hubungan dengan orang atau bangsa/negara lain.

Modul 14 ini akan membantu Anda menelusuri proses lahir dan dinamika pelaksanaan politik luar negeri Indonesia bebas aktif sejak kemerdekaan hingga masa reformasi, serta peran aktif Indonesia untuk ikut memelihara perdamaian dunia. Pelaksanaan politik luar negeri tergambar melalui jalinan persahabatan dengan bangsa dan negara lain baik pada lingkup regional maupun internasional. Sementara peran aktif dalam pemeliharaan perdamaian merupakan komitmen bangsa Indonesia dan sekaligus menjalankan amanah alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Seperti kita ketahui bahwa salah satu syarat berdirinya suatu negara yang merdeka dan berdaulat adalah pengakuan dari negara lain yang sudah merdeka. Suatu negara yang mengakui eksistensi negara lain sebagai negara merdeka tentunya berharap akan menjadi negara sahabat. Dan bukti adanya hubungan persahabatan antarnegara atau antarkomunitas sudah berlangsung sejak dahulu.

Bagaimanakah dinamika sejarah hubungan persahabatan negara Indonesia dengan negara lain, baik pada lingkup regional maupun internasional?

Melalui Modul ini, Anda akan menelusuri dinamika hubungan persahabatan negara Indonesia dengan negara atau kelompok negara lain dari masa ke masa. Sesuai dengan karakteristik pendidikan kesetaraan maka modul sebagai bahan pembelajaran akan dilengkapi dengan penugasan dan latihan, yang harus diselesaikan secara individual maupun berkelompok atau bahkan tutorial.

No	Unit	Materi	Penugasan
14.1	Berbagi Itu Indah	Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Kontribusi Indonesia dalam Perdamaian Dunia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat artikel tentang makna persahabatan dikaitkan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif</li> <li>• Menganalisis perbandingan kebijakan politik luar negeri Indonesia dari masa ke masa khususnya pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan masa pemerintahan Orde Baru dan menuliskannya dalam bentuk artikel</li> </ul>
14.2	Dari Indonesia untuk Perdamaian Dunia	Peran Indonesia dalam Upaya Menciptakan Perdamaian Dunia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat artikel tentang peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok sebagai bentuk pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif</li> <li>• Menganalisis makna Deklarasi Juanda sebagai bentuk Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Kedua dan menuliskannya dalam bentuk artikel</li> </ul>

## MARI BELAJAR - 14.1

Warga belajar yang budiman, setelah Anda tuntas mempelajari Modul 13 mata pelajaran Sejarah Indonesia Tingkat VI setara kelas XII, maka Anda berhak untuk mempelajari modul berikutnya, yaitu Modul 14 yang akan membahas tentang Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif.

Politik luar negeri suatu negara merupakan strategi dan pedoman yang digunakan oleh negara dalam melakukan hubungan atau kerja sama dengan negara lain di kancah internasional. Kebijakan politik luar negeri suatu negara sangat ditentukan oleh kebijakan nasional masing-masing pemerintahan. Bagaimanakah dengan politik luar negeri Indonesia bebas aktif? Kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjuangan bangsa dan negara Indonesia sebagai negara yang baru merdeka untuk memperoleh pengakuan dari negara lain. Strategi diplomasi menjadi andalan utama dalam menjalankan politik luar negeri pada awal kemerdekaan sampai sekarang. Politik luar negeri bebas aktif juga menjadi pedoman yang akan menentukan arah dan tujuan pemerintah Indonesia dalam menjalin hubungan internasional.

Untuk memahami proses lahir dan perkembangan politik luar negeri Indonesia bebas aktif, mari kita pelajari uraian materi unit 14.1 'Berbagi Itu Indah' berikut ini!

### A. Makna Bersahabat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bersahabat berasal dari kata dasar sahabat yang berarti kawan atau teman, sedangkan bersahabat memiliki arti 1. berkawan; berteman; atau 2. menyenangkan dalam pergaulan; ramah. Perwujudannya adalah ketika ada sahabat yang sedang sulit atau sakit tentunya kita akan bersimpati dan berempati untuk membantunya. Demikian juga sebaliknya, ketika sudah tidak ada persahabatan berarti ada

salah satu pihak yang sudah tidak mau bersahabat lagi. Seperti dikisahkan melalui lagu 'Kepompong' ini. Sebagai individu, kita akan selalu memerlukan orang lain dalam hidup dan kehidupan. Hal ini juga berlaku bagi suatu negara yang memerlukan negara lain sebagai sahabat.

Apa yang Anda ketahui tentang persahabatan? Barangkali Anda memiliki pemahaman yang berbeda dengan teman Anda tentang makna bersahabat. Hal ini wajar mengingat kita secara individual akan memiliki sudut pandang yang berbeda dengan orang lain, dan tentunya akan mempengaruhi dalam persepsi dan pemaknaannya.

#### Kepompong

Sind3ntosca

Dulu kita sahabat, teman begitu hangat

Mengalahkan sinar mentari

Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat

Berharap jadi kupu-kupu

Kini kita berjalan berjauhan-jauhan

Kau jauhi diriku karna sesuatu

Mungkin ku terlalu bertindak kejauhan

Namun itu karna ku sayang

Persahabatan bagai kepompong

Mengubah ulat menjadi kupu-kupu

Persahabatan bagai kepompong

Hal yang tak mudah berubah jadi indah

Persahabatan bagai kepompong

Maklumi teman hadapi perbedaan

Persahabatan bagai kepompong

Na na na na na

Dulu kita sahabat, teman begitu hangat

Mengalahkan sinar mentari

Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat  
Berharap jadi kupu - kupu  
Kini kita berjalan berjauh - jauh  
Kau jauhi diriku karna...

Sejarah hubungan persahabatan antar individu, antar komunitas/kelompok, atau antarnegara sudah dimulai seiring dengan keberadaan manusia itu sendiri. Dimulai dari bertemunya kesepakatan untuk membentuk kelompok yang memiliki kepentingan bersama dan saling menguntungkan satu sama lain. Beberapa bukti sejarah menunjukkan adanya hubungan persahabatan antarnegara atau antarkerajaan. Dalam sejarah juga terbukti latar belakang persahabatan juga sangat beragam dan umumnya untuk saling menguntungkan. Namun perlu dicatat apabila dasar pertimbangan persahabatan untuk saling menguntungkan maka akan langgeng dan sebaliknya apabila ada pihak yang memiliki kepentingan sendiri dalam persahabatan maka pada suatu saat akan putus juga tali persahabatannya.

Suatu negara juga akan selalu memerlukan negara lain sehingga perlu dijalin hubungan persahabatan dengan negara lain. Terdapat beberapa pertimbangan dan alasan suatu negara menentukan negara lain sebagai negara sahabat. Dasar pertimbangan dan alasan utama adalah pada aspek politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah masing-masing. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak merdeka sudah menetapkan kebijakan politik luar negeri adalah bebas aktif.

Politik luar negeri adalah arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain. Politik luar negeri merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diabdikan bagi kepentingan nasional dalam lingkup dunia internasional. Bebas artinya bebas memilih atau menentukan negara lain sebagai negara sahabat, sedangkan aktif artinya giat, dinamis, dan bereaksi ketika menghadapi suatu kondisi tertentu. Secara politik bebas artinya tidak terikat oleh suatu ideologi, tidak masuk blok negara asing tertentu sedangkan aktif artinya ikut mengambil prakarsa dalam mengembangkan persahabatan dan kerja sama internasional. Bebas aktif ini terbukti bahwa Indonesia selalu aktif ikut terlibat dalam penyelesaian masalah regional maupun internasional dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.

#### Latihan 14.1.1

Setelah mencermati makna di atas, pesan apa yang dapat Anda petik dari Makna Bersahabat? Diskusikan dengan sahabat Anda!

## B. Landasan Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif

Perhatikan gambar tokoh di samping! Tentu Anda sudah sangat tahu siapa beliau, yaitu Mohammad Hatta. Selain sebagai tokoh proklamator bersama Sukarno, bagaimana gagasan dan peran beliau dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif pertama kali disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Drs. Mohammad Hatta. Konsep dan prinsip politik luar negeri bebas aktif dikemukakan oleh Mohammad Hatta dalam pidatonya yang berjudul Mendayung di antara dua Karang pada tanggal 2 September 1948 dalam sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP).



Gambar 14.1.1 Mohammad Hatta  
Sumber: <https://id.wikipedia.org/>

Pemikiran Mohammad Hatta terkait dengan politik luar negeri bebas aktif tersebut tentunya tidak lepas dari situasi dan kondisi Indonesia saat itu. Sebagai negara yang baru merdeka sedang mengalami tantangan baik dari internal maupun eksternal. Pada saat itu Indonesia belum mendapat pengakuan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat dari kalangan internasional, di samping itu Indonesia juga harus menghadapi kekuatan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia setelah lepas dari penjajahan Jepang. Sementara itu, situasi politik internasional saat itu muncul persaingan dua kekuatan besar dunia antara Blok Barat pimpinan Amerika Serikat dan Blok Timur pimpinan Uni Soviet (Rusia) dalam bentuk 'Perang Dingin' setelah berakhirnya Perang Dunia II. Berdasarkan hal-hal tersebut maka kebijakan politik luar negeri Indonesia harus memiliki landasan yang kuat agar tidak mudah terseret arus politik global.

Tahukah Anda apa landasan kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif?

Politik luar negeri adalah strategi yang ditetapkan suatu negara sebagai pedoman dalam hubungan antarnegara di kancah internasional. Agar eksistensi bangsa dan negara tetap terjaga maka perlu menetapkan landasan yang kuat untuk menopang kebijakannya. Seperti halnya negara lain, Indonesia sebagai negara yang berdaulat tentu mempunyai landasan politik luar negerinya. Landasan kebijakan politik luar negeri Indonesia ada tiga, yaitu landasan idiil, konstitusional, dan operasional politik luar negeri Republik Indonesia.

Landasan idiil politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pedoman hidup bangsa, dan sebagai sumber dari segala hukum dan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Mohammad Hatta bahwa Pancasila dimaknai sebagai pedoman dasar dalam menjalani

kehidupan berbangsa dan bertanah air serta menjadi kesatuan besar dalam kepentingan nasional. Sementara, landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), terutama yang termuat pada Pembukaan UUD 1945 tentang cita-cita dan tujuan bangsa untuk ikut mewujudkan perdamaian dunia. Adapun landasan operasional politik luar negeri Indonesia ternyata sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman yang ditetapkan melalui kebijakan masing-masing pemerintah pada masanya.

Seperti halnya konsepsi kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang berawal dari isi pidato Mohammad Hatta, maka landasan operasional politik luar negeri bebas aktif saat itu sebagian besar juga didasarkan pada maklumat pemerintah dan pidato Presiden Soekarno maupun tokoh lain. Melalui Maklumat Politik Pemerintah Tanggal 1 November 1945, kebijakan politik luar negeri bebas aktif diartikan sebagai politik damai, dimana hubungan antarnegara dalam keadaan hidup berdampingan, tidak mencampuri urusan negeri lain, dan aktif melakukan kerja sama dengan negara lain pada semua bidang. Seiring dengan perubahan politik dan ketatanegaraan, pada masa pemerintahan Demokrasi Liberal (1950-1959) yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer, eksistensi Indonesia sebagai bangsa semakin mantap paling tidak di mata dunia barat. Kebijakan politik luar negeri bebas aktif secara operasional lebih ditujukan untuk memperluas hubungan dan kerja sama dengan berbagai negara dalam rangka memperoleh pengakuan atas eksistensi Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat.

Setelah berakhirnya pemerintahan Demokrasi Liberal atau Parlementer maka Indonesia memasuki era Demokrasi Terpimpin, yang berawal dari perbedaan pandangan antara dua tokoh proklamator Soekarno-Hatta. Perbedaan tersebut berujung dengan pengunduran diri Mohammad Hatta dari jabatan wakil presiden. Dengan mundurnya Mohammad Hatta sebagai wakil presiden dan sekaligus sebagai pengimbang kekuasaan Soekarno, maka berdampak pada kebijakan politik yang ditetapkan pemerintah. Kondisi ini semakin membuat leluasa ambisi Presiden Soekarno untuk menerapkan ide-idenya dalam kancah politik dan ketatanegaraan Indonesia. Dan pada saat bersamaan Soekarno mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup, yang sudah barang tentu bertentangan dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945.



Gambar 14.1.2 Ir Soekarno dan John F. Kennedy  
Sumber: [www.freedomiana.com](http://www.freedomiana.com).

Kondisi politik seperti itu akhirnya berdampak juga pada semua kebijakan pemerintah, termasuk dalam kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Landasan operasional politik luar negeri bebas aktif Indonesia terutama mengacu pada Amanat Presiden Soekarno yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” tanggal 17 Agustus 1959 atau yang dikenal sebagai “Manifesto Politik Republik Indonesia”. Garis besar isi amanat tersebut adalah melanjutkan perjuangan antiimperialisme ditambah dengan mempertahankan kepribadian Indonesia di tengah persaingan pengaruh antara Blok Barat dan Blok Timur. Kebijakan luar negeri seperti itu tidak lepas dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang pernah mengalami penjajahan yang cukup panjang. Oleh karena itu mempunyai kewajiban bersama negara lain



Gambar 14.1.3 Soeharto dan Richard M Nixon  
Sumber: [kebudayaan.kemdikbud.go.id](http://kebudayaan.kemdikbud.go.id)

berusaha menyingkirkan imperialisme dan menghindari keberpihakan pada dua blok yang bersaing sehingga memelopori terbentuknya negara-negara netral dalam Gerakan Non-Blok. Namun menjelang berakhirnya pemerintahan Demokrasi Terpimpin, ternyata semakin intensif dan menjadi lebih dekat dengan Blok Timur yang sosialis. Bantuan dana mengalir dari Rusia dan China dalam berbagai pembangunan infrastruktur, antara lain pembangunan stadion di Senayan (GBK), Pabrik Baja Krakatau Steel, dan lain-lain.

Landasan operasional politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru mengacu pada Ketetapan MPRS Nomor XII/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang Penegasan Kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia. Ketetapan MPRS ini adalah penegasan kembali tentang kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Bebas aktif dimaknai anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Serta semua upaya ini dilakukan dalam rangka mengabdikan kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat.

Adapun landasan operasional politik luar negeri Indonesia pada masa Reformasi (dari pemerintahan B.J. Habibie sampai dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono) ditetapkan melalui Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 tanggal 19 Oktober 1999 tentang Garis Besar Haluan Negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional periode tahun 1999-2004.

# Era Reformasi



Gambar14.1.4 Presiden Era Reformasi  
Sumber: mediainstanbelajar.blogspot.com

GBHN menekankan pada faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya krisis ekonomi dan krisis nasional pada tahun 1997, yang dapat mengancam integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di antaranya adalah ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu, GBHN juga menekankan perlunya upaya reformasi di semua bidang.

Kebijakan politik luar negeri Presiden B.J. Habibie menekankan pada upaya reformasi di berbagai bidang terutama penghapusan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan segala kejahatan ekonomi lainnya. Fokus utama kebijakan pemerintah Presiden B.J. Habibie adalah membangun kembali stabilitas ekonomi Indonesia yang sebelumnya sempat goyah karena adanya krisis moneter tahun 1998. Melalui kebijakan ekonomi ini pemerintahan Habibie berhasil menarik perhatian para investor asing dan institusi internasional untuk berinvestasi di Indonesia. Dalam bidang politik keamanan, Presiden Habibie juga memperbaiki keamanan Indonesia akibat adanya krisis Hak Asasi Manusia (HAM) yang sempat terjadi di Timor Timur. Langkah kebijakan luar negeri yang diambil Habibie adalah dengan mendekati diri dengan negara Barat untuk mencari dukungan atas keputusan referendum Timor Timur.

Seiring dengan pergantian pemerintahan maka kebijakan pemerintah pada masa Presiden Abdurrahman Wahid adalah menjalankan 'diplomasi persatuan' dengan mengelilingi delapan puluh negara dalam tempo waktu dua puluh bulan pemerintahannya. Kebijakan politik luar negeri ini dilakukan sebagai upaya mengumpulkan dukungan internasional terhadap wilayah kedaulatan Indonesia yang tengah menghadapi masalah disintegrasi. Namun kebijakan diplomasi ke berbagai negara tersebut mendapat kritik karena dianggap

terlalu boros dan menghabiskan keuangan negara. Ada beberapa kebijakan politik Presiden Abdurrahman Wahid yang kontroversial dan memicu polemik masyarakat, salah satunya adalah kebijakan politik luar negeri Presiden Abdurrahman Wahid dengan membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Landasan operasional politik luar negeri masa pemerintahan Presiden Megawati masih mengacu pada TAP MPR No.IV/MPR/1999 dengan tetap menyandarkan diri pada politik luar negeri bebasaktif sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. Adapun fokusnya adalah menekankan kepada sentralitas ASEAN sebagai pilar utama politik luar negeri Indonesia. Bentuk nyata kebijakan tersebut adalah meningkatkan kerjasama dalam segala bidang, dengan negara yang berbatasan langsung dan kerjasama kawasan ASEAN untuk memelihara stabilitas pembangunan dan kesejahteraan. Namun ada catatan buruk dalam kebijakan politik luar negeri masa Presiden Megawati, yaitu kekalahan Indonesia dalam kasus sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.

Dilanjutkan dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Kabinet Indonesia Bersatu yang meletakkan landasan operasional politik luar negeri dalam tiga program utama yaitu pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi, peningkatan kerjasama internasional terutama dengan ASEAN, serta komitmen perdamaian dunia untuk mengembangkan multilateralisme internasional. Secara garis besar kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY, antara lain terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain; kemampuan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan politik domestik dan internasional; menjalin hubungan dengan siapa saja yang bersedia membantu Indonesia dan menguntungkan pihak Indonesia; dan menerapkan konsep TRUST, yaitu membangun kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia.

Meskipun berbagai landasan operasional kebijakan politik luar negeri Indonesia dari masa ke masa, namun semuanya dalam kerangka kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri bebas aktif senantiasa menjadi kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan tata cara pergaulan dunia yang dilandasi prinsip damai, saling menghargai antarbangsa dengan tidak melakukan intervensi, memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional demi menjamin perdamaian dunia.

## Latihan 14.1.2

Mengapa landasan operasional politik luar negeri Indonesia selalu berubah pada masing-masing pemerintahan?

### C. Tujuan Politik Luar Negeri

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa suatu bangsa dan negara mutlak perlu menjalin hubungan dengan bangsa atau negara lain. Usaha diplomasi merupakan strategi utama dalam menjalin persahabatan dan kerja sama dengan negara lain. Indonesia sebagai negara yang baru merdeka tentunya sangat memerlukan pengakuan dari negara lain. Hal ini didasarkan pada hukum internasional bahwa salah satu kriteria berdirinya suatu negara merdeka adalah adanya pengakuan dari negara lain.

#### Syarat berdirinya suatu negara

1. Rakyat,
2. Wilayah,
3. Pemerintah yang berdaulat,
4. Pengakuan dari negara lain

Mengapa politik luar negeri Indonesia bebas aktif? Tentunya karena penentuan suatu kebijakan politik perlu mempertimbangkan banyak hal. Termasuk politik luar negeri Indonesia bebas aktif yang berlandaskan pada amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai negara yang baru merdeka maka kebijakan politik luar negeri juga mempertimbangkan konstelasi politik internasional saat itu. Berdasarkan situasi dan kondisi maka tujuan politik luar negeri Indonesia yang utama adalah mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keselamatan bangsa dan negara. Selain itu, politik luar negeri juga ditujukan untuk menjalin hubungan dengan negara lain dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat dan tentunya ikut mewujudkan perdamaian regional dan internasional dalam kerangka persaudaraan antarbangsa.

Kebijakan politik luar negeri Indonesia berkembang sesuai tuntutan dan kondisi zaman. Setiap periode pemerintahan menetapkan secara khusus landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang senantiasa berubah sesuai dengan kebijakan politik masing-masing pemerintahan namun tetap diupayakan dalam koridor untuk kepentingan nasional. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi Negara Indonesia terutama yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinia keempat yang menyatakan: “.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

#### Latihan 14.1.3

Apakah tujuan politik luar negeri bebas aktif sesuai dengan jati diri bangsa dan tujuan nasional Negara Indonesia?

### D. Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif dari Masa ke Masa

#### 1. Lahirnya Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif

Seperti halnya negara lain yang baru merdeka, pada awalnya Indonesia belum merumuskan kebijakan politik luar negeri seperti yang kita kenal sekarang. Kebijakan pemerintah Indonesia masih berkonsentrasi untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara dari ancaman kembalinya kekuasaan Belanda di Indonesia. Khusus pada kebijakan politik luar negeri pemerintah Indonesia masih berkonsentrasi pada upaya memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Tindak lanjut dari kebijakan ini adalah pemerintah mengusahakan serangkaian diplomasi ke beberapa negara. Untuk mempertahankan kedaulatan sebagai negara merdeka, selain dengan perjuangan bersenjata juga melakukan perundingan perdamaian untuk penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda. Upaya perundingan dengan melibatkan bantuan dari negara ketiga sebagai bentuk mediasi dan juga menggunakan jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keberhasilan Indonesia mendapatkan pengakuan dunia internasional melalui meja perundingan ini menjadi titik tolak dari perjuangan diplomasi Indonesia mencapai kepentingannya.

Suatu kebanggaan tersendiri, di tengah situasi dan kondisi menghadapi berbagai persoalan dalam negeri dan sekaligus ancaman Agresi Militer Belanda, ternyata pemerintah Indonesia dapat menentukan kebijakan politik luar negeri yang sangat fundamental. Peletakan dasar Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 2 September 1948 bahwa Politik Luar Negeri Indonesia adalah bebas aktif (an independent active).

#### 2. Politik Luar Negeri Indonesia Masa Demokrasi Liberal 1950-1959

Ciri khas pemerintahan Demokrasi Liberal ditandai dengan sistem pemerintahan kabinet parlementer sehingga sering disebut sebagai Demokrasi Parlementer, dimana kekuasaan pemerintahan dipegang oleh perdana menteri sebagai kepala pemerintahan beserta kabinetnya, sedangkan presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara. Perdana menteri bersama dengan para menteri atau kabinetnya, bertanggung jawab kepada parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kondisi inilah yang menjadikan program kerja pemerintah tidak dapat segera dituntaskan karena sering terjadinya pergantian kabinet.

Pada dasarnya pemerintahan masa Demokrasi Liberal masih melanjutkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif, namun konsentrasinya berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi politik dan keamanan dalam negeri maupun kawasan regional dan internasional saat itu. Pemerintahan kabinet parlementer ini sering diwarnai

dengan pergantian kabinet sehingga tidak memungkinkan untuk menjalankan program kerjanya secara tuntas.

Terlepas dari seringnya pergantian pemerintahan kabinet namun pemerintahan masa Demokrasi Liberal ini menorehkan keberhasilan nyata dalam hubungan internasional sebagai bentuk kebijakan politik luar negeri Indonesia. Seperti diuraikan di atas, bahwa perjuangan bangsa Indonesia mewujudkan negara merdeka dan berdaulat belum sepenuhnya selesai mengingat ancaman keamanan baik internal maupun eksternal khususnya Belanda. Meskipun menghadapi situasi dan kondisi seperti itu, perjuangan bersenjata tetap dilaksanakan namun sebagai bangsa yang cinta damai, berbagai diplomasi melalui perundingan juga dijalankan dan diikuti sesuai dengan kaidah hubungan internasional. Beberapa perundingan untuk penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda, antara lain Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Roem-Royen, dan diakhiri dengan Konferensi Meja Bundar (KMB). Selain keberhasilan tersebut, Indonesia juga aktif menjalin hubungan internasional dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Pemerintah Indonesia beberapa kali memprakarsai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental, antara lain Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955 dan Gerakan Non-Blok (GNB) atau (Non-Aligned Movement/ NAM). Forum ini merupakan bentuk reaksi dan refleksi atas terbaginya dunia kedalam dua kekuatan besar, yakni Blok Barat (Amerika Serikat) dan Blok Timur (Uni Soviet). Dengan terselenggaranya KAA dan pembentukan Gerakan Non Blok ini menunjukkan hasil nyata pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif untuk membantu bangsa-bangsa di dunia terlepas dari belenggu penjajahan.

### 3. Politik Luar Negeri Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin

Masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin didasarkan pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Tap MPRS Nomor VIII/MPRS/1965. Politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin bersifat revolusioner. Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, pada masa ini seluruh kekuasaan pemerintahan berada di tangan presiden. Presiden Soekarno mempromosikan konsep politik Nasakom (nasionalis, agama dan komunis) yang diterapkan baik di dalam negeri maupun dalam hubungan internasional. Melalui konsep Nasakom ini Presiden Soekarno menganggap kekuatan politik dunia akan didominasi Blok Barat dalam bentuk Neokolim (Neo Kolonialisme dan Imperialisme) yang akan menjalankan praktik kolonialisme dan imperialisme baru. Dari sini dapat dilihat adanya pergeseran arah politik luar negeri Indonesia yang lebih condong ke Blok Timur (komunis), baik secara domestik maupun internasional. Di tingkat internasional, kebijakan politik luar negeri saat itu lebih diintensifkan dengan

kelompok negara komunis, dan dikenal dengan istilah pembentukan Poros Jakarta-Peking-Pyongyang. Kebijakan politik luar negeri seperti ini tentunya menjadi bentuk penyimpangan terhadap prinsip bebasaktif dalam politik luar negeri Indonesia. Bentuk penyimpangan politik luar negeri lainnya adalah melakukan Konfrontasi dengan Malaysia dan Indonesia keluar dari keanggotaan PBB.

Namun demikian, pemerintah Indonesia masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin juga mencapai keberhasilan dalam menjalankan politik luar negerinya, antara lain: pada tanggal 1 Mei 1963 Indonesia berhasil mengembalikan Irian Barat (Papua) menjadi bagian dari wilayah Indonesia, yang perjuangan dilakukan melalui jalur diplomasi dan militer. Selain itu, Indonesia juga berhasil memelopori berdirinya Gerakan Non Blok.

### 4. Politik Luar Negeri Indonesia pada masa Orde Baru

Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, kebijakan pemerintah Orde Baru lebih memprioritaskan pada pembangunan ekonomi. Dengan alasan pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik tanpa adanya stabilitas politik keamanan atau sebaliknya terjaminnya politik keamanan maka pembangunan bidang lain dapat terlaksana. Salah satu perhatian dalam kebijakan politik luar negeri pemerintah Orde Baru adalah meningkatkan hubungan antarnegara melalui forum Association South East Asian Nation (ASEAN) untuk menjamin stabilitas keamanan kawasan regional. Selain itu, kebijakan politik luar negeri pemerintah Orde Baru (New Order) berusaha meningkatkan hubungan dengan negara-negara Blok Barat khususnya Amerika Serikat. Tujuan utamanya adalah mendapat kepercayaan dan sekaligus memobilisasi sumber dana internasional untuk kepentingan rehabilitasi ekonomi dalam negeri.

Namun demikian konsep dan azas politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi panduan dalam menjalankan kebijakan hubungan internasional. Pemaknaan politik luar negeri bebas aktif oleh pemerintah Orde Baru dapat dilihat dari pernyataan Presiden Soeharto mengenai politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, yaitu:

**“Dengan bangsa-bangsa di dunia kita berpegangan pada prinsip ‘hidup berdampingan secara damai’. Saling menghormati kedaulatan masing, tidak mencampuri urusan dalam negeri, dan kerjasama yang saling menguntungkan”**  
**Sumber: Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya”, 1989:418)**

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam bidang politik luar negeri, kebijakan politik luar negeri Indonesia lebih menaruh perhatian khusus terhadap soal regionalisme. Para pemimpin Indonesia menyadari pentingnya stabilitas regional untuk menjamin keberhasilan rencana pembangunan Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia juga mempertahankan persahabatan dengan pihak Barat, membuka pintu bagi investor asing, serta bantuan Presiden Soeharto juga selalu menempatkan posisi Indonesia sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan kebijakan dalam luar negerinya tersebut sebagaimana halnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.

Pada masa Orde Baru politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan. MPR mengeluarkan sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus didasarkan pada kepentingan nasional, seperti pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, kebenaran, serta keadilan. Kebijakan politik luar negeri pada era Orde Baru ditandai dengan meningkatnya hubungan kerja sama secara bilateral dan multilateral melalui keterlibatan dalam organisasi, seperti ASEAN, OPEC, UNESCO dan beberapa organisasi internasional lainnya termasuk menjadi anggota PBB.

#### **5. Politik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi**

Kebijakan politik luar negeri Indonesia di awal reformasi sebagai masa transisi pemerintahan masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik akibat krisis multidimensi. Isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sistem demokrasi, konflik separatisme, KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dan aspek lain menjadi hambatan tersendiri bagi pemerintahan transisi. Mengingat kondisi seperti ini, perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya pemulihan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia serta memulihkan perekonomian nasional. Masa awal reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden B.J Habibie yang disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di akhir era Orde Baru. Presiden Habibie berhasil menarik simpati dari Dana Moneter Internasional/ International Monetary Funds (IMF) dan Bank Dunia untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi. Kasus lepasnya Timor-Timur mewarnai perjalanan sejarah Indonesia khususnya masa pemerintahan B.J. Habibie, namun demikian pada masa ini pulapeletakan dasar demokrasi di Indonesia.

Pengganti Habibie adalah Abdurrahman Wahid yang terpilih menjadi Presiden Indonesia yang keempat pada tahun 1999. Kondisi politik diwarnai adanya transisi demokrasi menyebabkan ketidakstabilan politik, diperparah perekonomian masih

belum bangkit dari krisis dan timbulnya konflik horizontal dan vertikal semakin bermunculan dan mengancam keamanan nasional. Hal-hal itulah yang mengurangi kepercayaan internasional terhadap Indonesia.

Presiden Abdurrahman Wahid kemudian diganti oleh Megawati yang sebelumnya menjabat wakil presiden. Megawati mewarisi kondisi domestik Indonesia yang kacau dan kondisi hubungan luar negeri Indonesia yang minim kepercayaan internasional. Megawati dalam memimpin banyak mengambil kebijakan yang berorientasi kanan yang ditandai dengan dijadikannya Amerika Serikat sebagai negara non-Asia pertama yang dikunjungi Megawati. Selanjutnya, Megawati banyak melakukan kunjungan luar negeri sebagai bentuk kelanjutan usaha-usaha pendahulunya untuk mencari dukungan dan kerjasama luar negeri. Seperti halnya pada masa Habibie dengan keluarnya Timor Timur dari wilayah Indonesia, pada masa pemerintahan Megawati juga terjadi kekalahan dan kegagalan diplomasi terkait sengketa pulau Sipadan dan Ligitan dengan Malaysia yang berakibat terhadap lepasnya kedua pulau dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama kali yang melakukan pemilihan presiden-wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Melalui Pemilu 2004, Susilo Bambang Yudhoyono atau yang sering disebut SBY terpilih sebagai presiden dan terpilih lagi pada tahun 2009. Kebijakan politik luar negeri yang dilakukan oleh Presiden SBY adalah dengan pendekatan pragmatis, konstruktif, dan personal. Hubungan antarnegara dilakukan dengan prinsip memberikan solusi yang saling menguntungkan. Indonesia akan berperan dalam semua kegiatan selama untuk mendorong terciptanya kestabilan regional. Pendekatan personal juga dilakukandengan menarik simpati dan menjalin persahabatan dengan pemimpin negara lain.

Dengan demikian, sepanjang perjalanan politik luar negeri Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini, Indonesia memiliki banyak pengalaman mulai dari perbedaan gaya kepemimpinan setiap pemerintahan sampai dengan perkembangan sosial ekonomi dan politik di lingkup domestik, regional, dan internasional. Namun secara umum setiap kebijakan baik dalam negeri maupun luar negeri senantiasa ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasional.

## PENUGASAN 14.1.1

Setelah tuntas mempelajari materi unit 14.1 Berbagi itu Indah, tentunya Anda semakin memahami makna hubungan persahabatan dan perkembangan kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Adapun tugas yang harus Anda kerjakan adalah membuat sebuah artikel tentang makna persahabatan dikaitkan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif? Selain dari modul ini, Anda dapat mencari sumber referensi lain untuk menambah wawasan dan memperkaya hasil tulisan Anda.

### ■ Tujuan

Melalui penugasan ini diharapkan Anda dapat:

1. Menggali data atau informasi dari berbagai sumber dan sekaligus dapat menemukan sumber yang dapat dipercaya (kredibel).
2. Mengolah data atau informasi dari berbagai sumber mengenai sejarah perkembangan politik luar negeri Indonesia bebas aktif.
3. Menganalisis sejarah perkembangan politik luar negeri Indonesia bebas aktif sebagai upaya Indonesia menjalin persahabatan antarnegara dalam rangka menciptakan perdamaian dunia.
4. Menganalisis makna dan manfaat persahabatan serta menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### ■ Media

Untuk memperlancar penyelesaian tugas ini, Anda diminta menyiapkan:

1. Kertas HVS kuarto atau folio bergaris.
2. Bahan bacaan lain berupa buku, majalah, artikel, surat kabar baik tercetak maupun tidak tercetak (penelurusan internet).
3. Aplikasi WhatsApp atau e-mail.

### ■ Langkah Penugasan

Untuk mengerjakan tugas ini, Anda dapat mengikuti langkah berikut ini:

1. Bacalah kembali materi Unit 14.1 Berbagi Itu Indah
2. Untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan, cari dan baca artikel dari sumber lain (internet/buku yang relevan).

3. Tulislah artikel mengenai hubungan antara makna persahabatan dengan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia bebas aktif.

No	Aspek	Masa Demokrasi Terpimpin	Masa Orde Baru
1.	Kekuatan		
2.	Kelemahan		
3.	Simpulan		

4. Cantumkan sumbernya
5. Tulis atau ketik di kertas HVS Kuarto atau Folio Bergaris
6. Tugas diserahkan langsung pada Tutor atau kirim file d

Untuk melengkapi penguasaan dan pemahaman terhadap unit 14.1 ini, Anda diminta menjawab pertanyaan berikut:

1. Sebutkan syarat terbentuknya suatu negara? Jelaskan hubungannya dengan politik luar negeri Indonesia bebas aktif?

.....  
 .....

2. Jelaskan manfaat kerja sama antarnegara sebagai bagian dari politik luar negeri suatu negara?

.....  
 .....

## MARI BELAJAR - 14.2

Setelah mempelajari Unit 14.1 dan menyelesaikan tugasnya, Anda akan melanjutkan untuk mempelajari Unit 4.2 Dari Indonesia untuk Perdamaian Dunia. Melalui unit ini, Anda akan menelusuri peran penting pemerintah Indonesia dalam aktivitas politik internasional dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Berbagai kontribusi pemerintah Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia tersebut, antara lain pada penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika, pembentukan Gerakan Non Blok, ASEAN, Deklarasi Juanda, Organisasi Konferensi Islam, dan *Jakarta Informal Meeting*.

Berbagai peran tersebut menunjukkan prestasi diplomasi pemerintah Indonesia dalam melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Salah satu prestasi diplomasi saat ini ditunjukkan dengan terpilih kembali Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Selain itu, Indonesia juga ditetapkan menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB periode 2020-2022 (Media Indonesia, 28 Mei 2020). Prestasi diplomasi yang diperoleh pemerintah Indonesia tentunya menjadi kebanggaan dan harus diapresiasi oleh kita semua sebagai warga negara.

Baiklah kita simak peran dan kontribusi Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia, baik melalui pembentukan organisasi kerja sama, penggalangan suatu gerakan bersama, pengiriman misi perdamaian maupun penyediaan fasilitas perundingan, berikut ini!

### A. Konferensi Asia Afrika (KAA)

Perkembangan politik pasca Perang Dunia II diwarnai munculnya persaingan antara dua kelompok kekuatan dunia, yaitu Blok Barat (Amerika Serikat) dan Blok Timur (Uni Soviet/Rusia). Kehadiran badan perdamaian dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sepertinya menjadi tidak berarti karena kenyataannya dua negara pimpinan masing-masing blok tersebut memiliki pengaruh dan kekuasaan yang dominan, termasuk dalam pengambilan keputusan PBB. Di sisi lain, masih banyak masalah di beberapa belahan dunia terkait dengan praktik penjajahan suatu bangsa atas bangsa lainnya terutama di kawasan Asia, Afrika, Amerika Selatan (Latin), dan kawasan lainnya.

Hal itulah yang menimbulkan keprihatinan bagi semua pimpinan negara yang baru merdeka. Bentuk keprihatinan kemudian mendorong beberapa pemimpin negara-negara di kawasan Asia untuk mengadakan pertemuan bersama. Pertemuan informal pertama dilaksanakan pada tanggal 28 April sampai dengan 2 Mei 1954 di Kolombo, Pakistan oleh 5 (lima) pimpinan negara, yaitu Sir John Kotelawala (Ceylon /Srilangka), U Nu (Birma/Myanmar), Jawaharlal Nehru (India), Ali Sastroamidjojo (Indonesia), dan Mohammed Ali (Pakistan). Pertemuan informal ini kemudian disebut Konferensi Kolombo, dengan agenda membicarakan masalah yang menjadi kepentingan bersama dan akhirnya sepakat untuk menyelenggarakan pertemuan lebih besar dengan melibatkan negara-negara Asia Afrika lainnya.



Gambar: 14.2.1 Gedung Merdeka saat Pelaksanaan KAA  
Sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Merdeka.jpg>

Untuk mewujudkan pertemuan yang lebih besar, kemudian dilakukan langkah persiapan berikutnya, yaitu pertemuan 5 perdana menteri tersebut di Bogor pada tanggal 28 dan 29 Desember 1954 yang dikenal dengan Konferensi Panca Negara. Hasil dari pertemuan tersebut intinya adalah adanya kesepakatan tentang agenda acara, tujuan, dan negara-negara yang akan diundang pada suatu konferensi yang akan mengundang negara-negara di Asia dan Afrika. Akhirnya disepakati untuk penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung, dimana Indonesia sebagai tuan rumah dan kepanitian dari wakil kelima negara tersebut.

Gedung Dana Pensiun dan Gedung Concordia dipersiapkan sebagai tempat sidang-sidang konferensi. Persiapan konferensi semakin matang mulai dari akomodasi dan transportasi buat peserta, panitia, wartawan, dan lain-lain. Persiapan konferensi bahkan diperiksa oleh Presiden Soekarno pada 7 April 1955 dengan meresmikan penggantian nama gedung yang akan menjadi tempat konferensi, yaitu Gedung Concordia menjadi Gedung Merdeka, Gedung Dana Pensiun menjadi Gedung Dwiwarna, dan Jalan Raya Timur menjadi Jalan Asia Afrika.

Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika atau lebih dikenal dengan Konferensi Asia Afrika (KAA) dimulai dan diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan pidato Presiden Soekarno berjudul "Let a New Asia And a New Africa be Born" (Mari Kita Lahirkan Asia Baru dan Afrika Baru). Pidato pembukaan oleh Presiden Soekarno ini mengandung pesan dan harapan kepada semua peserta. Intinya bahwa meskipun semua peserta konferensi memiliki keragaman dari aspek kebangsaan, latar belakang

sosial dan budaya, agama, sistem politik, bahkan warna kulit, namun semuanya memiliki niat dan semangat yang sama untuk bersatu. Semangat ini dipersatukan oleh pengalaman pahit yang sama akibat praktik kolonialisme dan juga keinginan yang sama dalam usaha mempertahankan dan memperkokoh persaudaraan antarbangsa Asia Afrika.

### Dasasila Bandung

1. Menghormati hak-hak asasi manusia dan menghormati tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB.
2. Menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara.
3. Mengakui persamaan derajat semua ras serta persamaan derajat semua negara besar dan kecil.
4. Tidak campur tangan di dalam urusan dalam negeri negara lain.
5. Menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan dirinya sendiri atau secara kolektif, sesuai dengan Piagam PBB.
6. a. Tidak menggunakan pengaturan-pengaturan pertahanan kolektif untuk kepentingan khusus negara besar mana pun.  
b. Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain mana pun.
7. Tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi atau menggunakan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara mana pun.
8. Menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan cara-cara damai, seperti melalui perundingan, konsiliasi, arbitrase, atau penyelesaian hukum, ataupun cara-cara damai lainnya yang menjadi pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB.
9. Meningkatkan kepentingan dan kerja sama bersama.
10. Menjunjung tinggi keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional.

Konferensi Asia Afrika berhasil merumuskan kesepakatan dan deklarasi bersama dengan nama Dasasila Bandung. Melalui Konferensi Asia Afrika, timbul dorongan semangat dan kekuatan moral negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika untuk bersama-sama menggali kekuatan menuju kemerdekaan dan kedaulatan semua bangsa.



Gambar 14.2.2 Soekarno, M.Hatta, dan tokoh KAA  
Sumber : <https://www.google.com>

Semangat Bandung telah mengubah pandangan dunia tentang hubungan internasional terhadap negara-negara Asia Afrika sebagai kelompok dunia ketiga yang tidak terikat pada kedua blok yang telah ada. Melalui penyelenggaraan KAA membuktikan bahwa berbagai peran telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia.

### B. Gerakan Non-Blok (GNB)

Salah satu latar belakang munculnya Gerakan Non Blok adalah akibat persaingan antara Blok Barat (Amerika Serikat dengan sekutunya) dan Blok Timur (Uni Soviet/Rusia dengan sekutunya). Persaingan kedua blok tersebut bahkan sempat memicu terjadinya beberapa konflik terutama di Asia, seperti Perang Korea, dan Perang Vietnam. Ketegangan dunia semakin meningkat akibat persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur yang mencapai puncaknya pada krisis Teluk Babi di Kuba, yang hampir saja memicu Perang Dunia III.

Bagaimanakah peran Indonesia dalam lahirnya Gerakan Non Blok?

Hubungan kerja sama antarnegara, baik secara bilateral maupun multilateral sudah dimulai sejak Indonesia merdeka. Selain menjalin kerja sama antarnegara, Indonesia juga menjadi salah satu pelopor lahirnya suatu gerakan bersama beberapa negara dalam menghadapi persaingan dua kelompok kekuatan dunia. Mengingat saat itu persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur membawa suhu politik dunia kian memanas. Antarblok saling berebut pengaruh untuk mengikutsertakan negara-negara lain bergabung dalam kelompoknya.

Terbentuknya Gerakan Non Blok tidak terlepas dari proses penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Bermula dari pertemuan lima pemimpin negara India, Burma (Myanmar), Ceylon (Srilanka), Indonesia, dan Pakistan dalam rangka persiapan KAA. Pada pertemuan tersebut, Jawaharlal Nehru menyampaikan gagasan yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan hubungan kerja sama antarnegara. Gagasan tersebut tertuang dalam lima prinsip, yaitu saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan, perjanjian non-agresi, tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain, kesetaraan dan keuntungan bersama, serta menjaga perdamaian. Hal inilah yang melatarbelakangi kesepakatan bersama untuk mendirikan suatu gerakan bukan membentuk suatu organisasi. Negara-negara tersebut bersepakat untuk membentuk suatu gerakan yang tidak ingin



Gambar 14.2.3 Presiden Soekarno berpidato pada KTT I GNB di Beograd  
Sumber: <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan>

terbawa arus dalam persaingan kedua blok dunia sehingga dinamakan Gerakan Non Blok (GNB) atau Non Align Movement (NAM). Melalui GNB diharapkan semua negara anggota tidak pasif dalam politik internasional namun justru menemukan cara dan strategi secara independen dalam ikut mendukung terwujudnya perdamaian dunia.

Namun sebelum diselenggarakannya pertemuan 5 pemimpin negara tersebut, telah diawali pertemuan tiga pemimpin negara India, Mesir dan Yugoslavia. Pertemuan ketiga pimpinan negara tersebut berlangsung pada tahun 1956 di Pulau Brijuni, Yugoslavia dan menghasilkan Deklarasi Brijuni, yang ditandatangani Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, dan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser.

Untuk merealisasikan gagasan bersama yang dilandasi Dasasila Bandung tersebut, para pemimpin negara Asia Afrika dan negara Yugoslavia mengadakan pertemuan yang menandai lahirnya Gerakan Non Blok (GNB) melalui penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I GNB di Beograd, Yugoslavia pada 1-6 September 1961. KTT I GNB ini dihadiri oleh 25 anggota, yang sebagian besar berasal dari negara Asia dan Afrika serta negara Yugoslavia sebagai tuan rumah, Kuba dan Siprus.



Gambar 14.2.4 Lima Tokoh Pendiri Gerakan Non Blok  
Sumber: <https://www.kompas.com/skola/image/2020/01/30/200000269/latar-belakang-terbentuknya-gerakan-non-blok>

Foto tersebut menunjukkan 5 tokoh utama GNB, yaitu Josip Broz Tito (Presiden Yugoslavia), Sukarno (Presiden Indonesia), Gamal Abdul Nasser (Presiden Mesir), Pandit Jawaharlal Nehru (Perdana Menteri India), dan Kwame Nkrumah (Presiden Ghana).

Sejak diawali dengan KTT I GNB di Beograd kemudian dilanjutkan dengan beberapa kali KTT yang berpindah dari satu negara ke negara lainnya. KTT VI GNB diselenggarakan pada 3-9 September 1979 di Havana, Cuba. Melalui KTT VI GNB ini telah berhasil merumuskan kesepakatan bersama dalam bentuk Deklarasi Havana, yang intinya berupa pembaharuan tujuan GNB. Adapun tujuan GNB yang tercantum dalam Deklarasi Havana, adalah untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara nonblok dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, apartheid, rasisme dan segala bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi, interferensi atau hegemoni dan menentang segala bentuk blok politik.

Sejak terselenggaranya KTT I GNB di Beograd ternyata menarik simpati sebagian besar negara dunia ketiga untuk ikut bergabung dalam GNB. Mayoritas negara-negara anggota GNB adalah negara-negara yang baru memperoleh kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Negara-negara dunia ketiga merasa senasib sehingga sangat antusias untuk bergabung menjadi anggota GNB. Hal ini dapat dilihat dari jumlah keanggotaan yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Bagaimana hubungan politik luar negeri Indonesia bebas aktif dengan Gerakan Non Blok?

Pada dasarnya politik luar negeri Indonesia bebas aktif selaras dengan lahirnya GNB. Makna bebas artinya Indonesia tidak terikat atau memihak salah satu blok kekuatan, sedangkan aktif maksudnya Indonesia aktif menciptakan perdamaian dunia. Dengan demikian keterlibatan Indonesia dalam memprakarsai lahirnya GNB sesuai dengan penerapan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Indonesia bahkan pernah memimpin GNB dari 1992 hingga 1995 dan Presiden Soeharto menjabat Ketua GNB. Peristiwa ini terjadi ketika Indonesia menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan KTT X GNB pada 1-6 September 1992 di Jakarta. Melalui KTT X GNB ini telah melahirkan kesepakatan bersama yang dinamakan Pesan Jakarta atau Jakarta Message. Beberapa isi pokok dari Pesan Jakarta antara lain, mendukung kemerdekaan Palestina, mengakhiri praktik diskriminasi rasial (apartheid) di Afrika Selatan, dan menolak penggunaan senjata nuklir. GNB yang semula lebih menitikberatkan pada masalah politik internasional, namun setelah berakhirnya persaingan dua blok dalam bentuk Perang Dingin maka GNB lebih banyak memfokuskan pada masalah ekonomi dunia.

### C. Misi Pemeliharaan Perdamaian Garuda

Selain berperan dalam pembentukan organisasi kerja sama maupun dalam bentuk suatu gerakan bersama seperti GNB, Indonesia juga selalu proaktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Kali ini akan kita bahas upaya Indonesia dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia melalui pengiriman misi pemeliharaan perdamaian Garuda atau Misi Garuda. Sejak pertama kali



Gambar 14.2.5 Pengiriman Misi Garuda  
Sumber: <https://kumeokmemehdipacok.blogspot.com>

diadakannya pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian, Indonesia sudah beberapa kali ikut mengirimkan pasukannya. Dalam pengiriman misi pemeliharaan perdamaian ini, pasukan Garuda dari Indonesia akan bergabung dengan pasukan dari negara lain, sehingga muncul istilah Kontingen Garuda (KONGA).

Pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian sesuai dengan namanya memiliki misi dan bertugas mendamaikan perselisihan yang terjadi di suatu kawasan, baik perselisihan internal suatu negara maupun perselisihan antarnegara. Pasukan pemeliharaan perdamaian ini berada di bawah koordinasi PBB dan biasanya merupakan pasukan gabungan dari beberapa negara yang bersedia mengirimkan pasukan perdamaannya.

Seperti telah diuraikan pada awal modul ini, bahwa Indonesia menetapkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang dilandasi prinsip cinta damai. Hal ini sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama pada alinea IV, yaitu salah satu tujuan negara yakni menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Realisasi mewujudkan amanat Pembukaan UUD 1945 melalui kebijakan politik luar negeri bebas aktif dapat dilakukan dalam berbagai cara dan salah satunya adalah melalui pengiriman pasukan pemelihara perdamaian.

Awal mula pembentukan pasukan perdamaian dunia tidak terlepas dari terbentuknya United Nations Peacekeeping Operations (Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa/MPP PBB). Sesuai dengan namanya, MPP PBB adalah misi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional di bawah naungan program PBB. Peran MPP PBB pada awalnya hanya terbatas pada pemeliharaan gencatan senjata dan stabilisasi situasi di daerah konflik. Intinya PBB mengirimkan pasukan perdamaian untuk ikut menyelesaikan pertikaian atau konflik melalui gencatan senjata sehingga akan ditemukan jalan damai. Namun, dalam perkembangannya, tugas MPP PBB menjadi semakin luas tidak hanya terbatas pada upaya penyelesaian konflik antarnegara, tetapi kini juga dapat diterjunkan pada berbagai konflik internal dan perang saudara, bahkan sampai dihadapkan pada penyelesaian berbagai jenis dan bentuk konflik, ancaman kelompok bersenjata, terorisme dan radikalisme, sampai pada upaya pemberantasan penyakit menular.

Keikutsertaan Indonesia mengirim pasukan perdamaian Garuda pertama kali (KONGA I) dilakukan pada bulan Januari 1957. Pengiriman misi pemeliharaan perdamaian ini dilatarbelakangi adanya konflik di Timur Tengah antara Mesir dengan Inggris, Perancis dan Israel. Konflik bermula dari nasionalisasi Terusan Suez oleh Presiden Mesir, Gamal Abdul Nasser pada 26 Juli 1956. Tindakan Mesir ini kemudian diikuti dengan serangan militer gabungan Inggris, Perancis dan Israel terhadap Mesir pada bulan Oktober 1956. Serangan ini menimbulkan konflik militer berskala besar atau Krisis Suez dan tentunya memerlukan perhatian internasional. Situasi ini mengancam perdamaian dunia sehingga Indonesia



melalui mekanisme diplomasi internasional mendorong PBB untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke kawasan krisis tersebut. Pasukan pemeliharaan perdamaian (United Nations Emergency Force/UNEF) dari PBB akhirnya dikirim ke Mesir, dimana pasukan dari Indonesia menjadi bagian di dalamnya. Selain itu, Dewan Keamanan PBB turun tangan dan mendesak pihak-pihak yang bersengketa untuk berunding. Krisis Suez berakhir setelah PBB memberikan izin pengelolaannya ke Mesir pada April 1957.

Peran Indonesia untuk mengirimkan pasukan pemeliharaan perdamaian ke Mesir tersebut membuktikan peran aktif Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Namun di sisi lain, antara Mesir dan Indonesia memiliki hubungan istimewa. Pada saat Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Mesir segera bersidang dengan negara-negara Liga Arab dan hasilnya adalah mengakui kemerdekaan Indonesia pada 18 November 1946. Pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari negara lain pertama kali berasal dari Mesir dan negara-negara Liga Arab sehingga pengakuan *de jure* ini merupakan bukti berdasarkan hukum hubungan internasional.

Peran Indonesia melalui pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian membuktikan peran aktif Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Setiap kali PBB mengirim pasukan pemeliharaan perdamaian, Kontingen Garuda (KONGA) selalu berusaha ikut bergabung. Pengiriman misi pemeliharaan perdamaian Garuda ini bahkan tercatat sudah sampai 30 (tiga puluh) kali, dimulai dari KONGA I di Mesir sampai dengan KONGA XXX di Libanon.

#### D. Pembentukan Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)



Gambar 14.2.7 Lambang dan Bendera Negara-Neraga ASEAN  
Sumber: <https://1.bp.blogspot.com/>

Upaya Indonesia untuk meningkatkan hubungan kerja sama antarnegara tetangga semakin intensif dengan adanya kesepakatan bersama untuk membentuk organisasi kerja sama negara-negara di Asia Tenggara. Keinginan Indonesia mendapat sambutan dari sesama negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Keinginan ini didorong situasi dan kondisipolitik dunia pada era 1960-an sedang terjadi perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar yang

dapat menyulut konflik antarnegara di kawasan Asia Tenggara. Salah satu motivasi pembentukan organisasi kerja sama di kawasan Asia Tenggara ini adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman dan damai.

Upaya pembentukan organisasi kerja sama tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan antarmenteri luar negeri dari lima negara, yakni Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), S Rajaratman (Singapura), Narsisco Ramos (Filipina) dan Thanat Khoman (Thailand) pada tanggal 5-8 Agustus di Bangkok. Melalui pertemuan tersebut, lima menteri luar negeri menandatangani suatu deklarasi yang dikenal sebagai Deklarasi Bangkok atau *Bangkok Declaration*, pada 8 Agustus 1967. Deklarasi tersebut merupakan kesatuan tekad

kelima negara untuk membentuk suatu organisasi kerja sama regional yang disebut Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (PERBARA) atau *Association of South East Asian Nations (ASEAN)*. Deklarasi Bangkok tersebut juga menegaskan bahwa ASEAN merupakan organisasi kerjasama negara-negara Asia Tenggara yang bersifat non politik dan non militer. Terbentuknya ASEAN merupakan forum bersama



Gambar 14.2.8 Penandatanganan Deklarasi Bangkok  
Sumber: <http://setnas-asean.id/tentang-asean>

#### Isi Deklarasi Bangkok

- Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara
- Meningkatkan perdamaian dan kestabilan regional
- Meningkatkan kerja sama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi
- Memelihara kerja sama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada
- Meningkatkan kerja sama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara.

untuk mempererat hubungan persahabatan antarnegara dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi, stabilitas sosial budaya, dan kesatuan regional.

Berdasarkan Deklarasi Bangkok, tujuan didirikannya ASEAN tidak semata-mata karena faktor politik dalam arti untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas di kawasan regional dan mengadakan dialog untuk membahas perbedaan yang terjadi di antara anggotanya. Namun tujuannya lebih luas lagi yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya. Pembentukan ASEAN dilandasi beberapa prinsip kerja sama, antara lain:

- Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN;
- Komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan ASEAN;
- Menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional;
- Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN, dan menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, serta pemajuan keadilan sosial.

Untuk mendukung keberadaan sebagai organisasi, Pemerintah Indonesia menyediakan tempat untuk dijadikan kantor Sekretariat ASEAN (gedung eks Kantor Walikota Jakarta Selatan) di Jakarta. Sebagai forum kerja sama, struktur organisasi ASEAN terdiri atas

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), Dewan Koordinasi, Dewan Masyarakat, dan Pertemuan Badan-badan Sektoral Tingkat Menteri, serta Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi di bawah Menteri. KTT ASEAN adalah pertemuan tingkat tinggi para kepala negara/pemerintahan negara anggota dan sejak berdiri sampai saat ini telah melaksanakan 14 kali KTT resmi, 4 KTT tidak resmi, dan 1 KTT Luar Biasa.



Gambar14.2.9 Kantor ASEAN di Jakarta  
Sumber. Poskotanews.com

Dengan demikian, peran Indonesia dalam pembentukan ASEAN merupakan salah satu bentuk realisasi dari kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Mengingat sejak awal didirikannya semua anggota sepakat untuk memprioritaskan kerja sama di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Namun apabila diperlukan hubungan kerja sama dalam bidang lain seperti bidang politik dan militer akan dilakukan secara bilateral antara kedua negara saja tanpa melibatkan anggota ASEAN lainnya. Sebagai contoh kerja sama militer yang pernah dilakukan Indonesia dan Malaysia untuk meredam bahaya komunis di daerah perbatasan kedua negara. Berkat adanya ASEAN maka solidaritas dan upaya damai dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul di antara anggota selalu dapat terselesaikan. Beberapa contoh kasus yang dapat diselesaikan dengan baik, antara lain sengketa antara Malaysia dan Filipina menyangkut Sabah wilayah di Boneo/Kalimantan Utara, persoalan hukuman mati dua orang anggota marinir Indonesia di Singapura, kerusuhan rasialis di Malaysia, permasalahan minoritas muslim di Thailand Selatan, dan lain-lain. Beberapa masalah tersebut dapat memicu potensi konflik antarnegara, namun melalui diplomasi yang baik dan dilandasi saling pengertian antarnegara akhirnya tidak terjadi konflik terbuka sehingga tetap terjaga stabilitas keamanan di kawasan regional Asia Tenggara.

## E. Deklarasi Juanda

Tahukah Anda Hari Nusantara?

Melalui Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara dan diperingati sebagai Hari Nasional. Peringatan Hari Nusantara ini merupakan penegasan

dan pengingat kembali bahwa Indonesia adalah Negara Kepulauan terbesar di dunia. Hari Nusantara merupakan perwujudan dari Deklarasi Djuanda yang dianggap sebagai Deklarasi Kemerdekaan Indonesia kedua. Deklarasi Djuanda menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah yang utuh dan berdaulat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebelum Deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.

Kedaulatan wilayah laut Negara Indonesia mulai digagas pada masa pemerintahan Perdana Menteri (PM) Ali Sastroamidjojo, melalui pembentukan Panitia Inter-Departemental untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Wilayah Perairan Indonesia dan Lingkungan Maritim pada tahun 1956. Gagasan ini kemudian dimatangkan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja dengan mengeluarkan Pengumuman Pemerintah mengenai Perairan Negara Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957, yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Djuanda. Pengumuman ini menyatakan bahwa: 1) Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai corak tersendiri; 2) sejak dahulu kepulauan Nusantara sudah merupakan satu kesatuan; 3) ketentuan ordonansi 1939 dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Deklarasi Djuanda tersebut selanjutnya diresmikan menjadi Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.

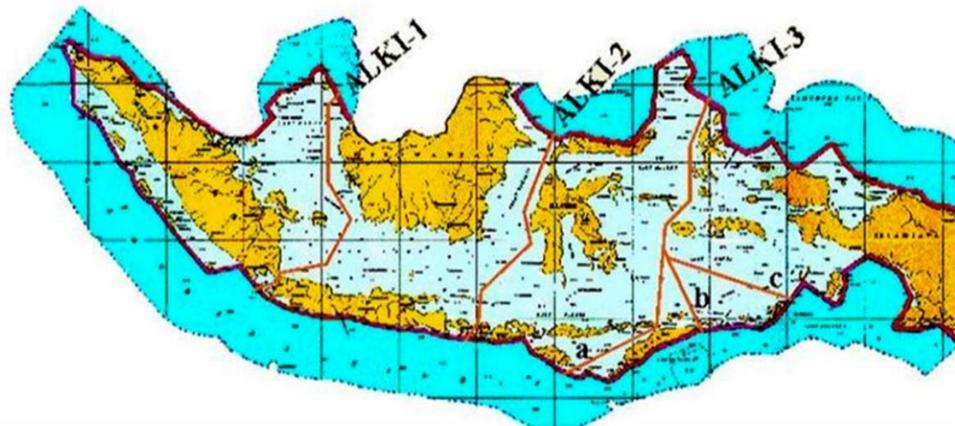
Melalui Deklarasi Juanda tersebut tidak berarti perjuangan Indonesia menentukan batas wilayah kedaulatan Negara Indonesia sudah selesai. Beberapa negara melakukan protes tidak setuju namun ada juga beberapa negara yang menyetujuinya. Perjuangan diplomasi ini dilanjutkan pada pelaksanaan Konferensi PBB tentang Hukum Laut



Gambar 14.2.10 Djuanda Kartawidjaja  
Sumber. <https://jurnalmaritim.com/mengenang-deklarasi-djuanda-di-hari-nusantara/>

Internasional atau Konferensi Hukum Laut Internasional. Pelaksanaan Konferensi Hukum Laut Internasional I diadakan pada tahun 1958 di Jenewa, Swiss. Melalui konferensi ini untuk pertama kalinya asas negara kepulauan “*archipelagic state principles*” diperkenalkan kepada dunia. Namun usaha Indonesia dan negara kepulauan lainnya belum berhasil dan dilanjutkan dalam Konferensi Hukum Laut Internasional II pada tahun 1960. Pada konferensi kedua ini Indonesia mengusulkan batas laut 12 mil namun Amerika Serikat dan beberapa negara lain menolaknya.

Untuk memperoleh dukungandari negara lain, Indonesia melakukan persiapan matang menghadapi Konferensi Hukum Laut Internasional III. Harapan dukungan lebih luas diharapkan berasal dari negara-negara ASEAN, Gerakan Non Blok, Kelompok 77 (kelompok negara berkembang) dari Asia, Afrika, Amerika Latin, dan lain-lain. Upaya memperoleh dukungan juga diperkuat melalui hubungan bilateral khususnya dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet dan Australia. Upaya diplomatik untuk menemukan kompromi bersama dalam hukum laut internasional membuahkan hasil karena negara Barat, terutama Amerika Serikat mendukung pemerintahan Orde Baru.



Gambar 14.2.11 Wilayah Indonesia sesuai Deklarasi Djuanda 1957  
 Sumber : <https://www.kompas.com/skola/image/2020/02/18/160000969/deklarasi-djuanda--isi-tujuan-dan-dampaknya?page=1>

Perjuangan panjang akhirnya baru berhasil pada Konferensi PBB tentang Hukum Laut Internasional III di Teluk Montego, Jamaika pada tahun 1982. Konferensi ini melahirkan Konvensi Hukum Laut Internasional (*United Nations Convention on the Law of the Sea* UNCLOS) yang ditandatangani oleh 119 negara pada tanggal 10 Desember 1982 sehingga dikenal dengan sebutan UNCLOS 1982. Menurut UNCLOS 1982 yang dimaksud sebagai Negara Kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lainnya. Kepulauan berarti suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan di antaranya, dan lain-lain wujud ilmiah yang hubungannya satu

sama lainnya demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik. UNCLOS selain mengatur negara kepulauan juga mengatur laut di luar laut teritorial, transportasi laut, dan sumber daya alam yang berada di bawah laut, di dasar laut, di dalam laut, dan di atas permukaan laut. Berdasarkan UNCLOS 1982 tersebut pemerintah Indonesia meratifikasinya melalui penetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 untuk mempertegas aturan dari PBB yang menyatakan Indonesia negara kepulauan.

## F. Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa situasi kondisi politik internasional pasca Perang Dunia II diwarnai ketegangan bahkan di beberapa kawasan seperti Terusan Suez terjadi konflik bersenjata. Ketegangan politik di Timur Tengah bertambah panas akibat terjadinya pembakaran Masjid Al Aqsa pada 21 Agustus 1969 oleh pengikut fanatik Kristen dan Yahudi di Yerusalem. Sebagai bentuk reaksi negara-negara Islam terhadap peristiwa pembakaran



Gambar 14.2.12 Lambang OKI  
 Sumber: [wawasansejarah.com](http://wawasansejarah.com)

Masjid Al Aqsa adalah pemimpin negara-negara Islam mengadakan konferensi di Rabat, Maroko, pada tanggal 25 September 1969 dan menghasilkan Deklarasi Rabat. Salah satu isi Deklarasi Rabat adalah negara-negara Islam akan berupaya mempererat kerja samadan tolong menolong dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, budaya, keyakinan, berdasarkan ajaran Islam. Kawasan Timur Tengah semakin rentan terjadi perang terbuka setelah Israel menduduki Yerusalem bahkan kemudian Israel menduduki beberapa wilayah di jazirah Arab yang menyebabkan perang Arab-Israel pada tahun 1967. Beberapa peristiwa tersebut menimbulkan reaksi umat Islam dan negara-negara Islam untuk menggalang kekuatan bersama dengan membentuk suatu organisasi kerja sama antarnegara Islam. Melalui organisasi diharapkan kekuatan dan solidaritas sesama negara Islam akan terbangun.

Deklarasi Rabat menegaskan perlu dibentuk organisasi kerja sama atas dasar agama Islam, penghormatan pada Piagam PBB dan hak asasi manusia. Deklarasi Rabat juga menjadi awal pembentukan Organisasi Konferensi Islam (OKI) atau *Organisation of Islamic Cooperation*. Tindak lanjut Deklarasi Rabat, pada 1970 para menteri luar negeri negara-negara Islam berkumpul di Jeddah membahas sikap dan tindakan politik negara Islam

serta menetapkan Jeddah sebagai markas OKI. Secara umum tujuan OKI diarahkan untuk memperkuat ikatan persaudaraan sesama negara-negara Islam yang dilandasi hak suatu bangsa untuk berdaulat. Secara garis besar tujuan OKI, antara lain:

- Meningkatkan kerja sama dan solidaritas antar negara anggota OKI;
- Menghapus perbedaan rasial, diskriminasi, dan kolonialisme;
- Mengupayakan perlindungan bagi tempat-tempat suci Islam; dan
- Mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan hak pembentukan negara merdeka dan berdaulat.

Sejak berdiri, OKI sudah menyelenggarakan beberapa kali Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dengan sejumlah hasilnya. KTT OKI ke-14 dilaksanakan pada 31 Mei 2019 di Makkah, Arab Saudi menghasilkan 12 poin yang disebut sebagai 'Deklarasi Makkah Al-Mukarramah'. Salah satu isi Deklarasi Mekah adalah menekankan pentingnya Palestina sebagai sentral perjuangan umat Islam untuk mengakhiri pendudukan Israel di teritori Arab dan Palestina sejak 1967. Hal ini menunjukkan bahwa perjalanan menuju perdamaian khususnya kawasan Timur Tengah memang masih panjang dan perlu kerja sama dan solidaritas sesama anggota OKI.

### G. Jakarta Informal Meeting

Peran penting Indonesia berikutnya ditunjukkan pada saat terjadinya konflik dan perebutan kekuasaan di Kamboja. Konflik Kamboja juga melibatkan negara tetangga terdekatnya, Vietnam bahkan sampai melibatkan beberapa negara adidaya Amerika Serikat, Uni Soviet (Rusia), dan Cina.

Konflik diawali pada tanggal 18 Maret 1970, saat Letnan Jenderal Lon Nol, Perdana Menteri Kamboja bersama Pangeran Sisowath Sirik Matak melakukan kudeta terhadap kekuasaan Sihanouk. Sihanouk kemudian memilih untuk mengasingkan diri di Beijing dan memutuskan untuk beraliansi dengan Khmer Merah, yang bertujuan untuk menentang pemerintahan Lon Nol. Khmer merah di bawah pimpinan Pol Pot berhasil menggulingkan kekuasaan Lon Nol pada 17 April 1975 dan sekaligus mengubah bentuk negara dari kerajaan menjadi sebuah Republik Demokratik Kamboja (*Democratic Kampuchea*).

Kebijakan Pol Pot berikutnya melalui Revolusi Agraria yang justru membawa kesengsaran rakyat Kamboja akibat kelaparan, wabah penyakit dan pembantaian. Pembantaian oleh rezim Khmer Merah juga dilakukan terhadap warga keturunan Vietnam di Kamboja sehingga Vietnam menyerbu Kamboja. Invasi Vietnam berhasil menggulingkan rezim Khmer Merah dan mendirikan rezim baru di Kamboja dengan Heng Samrin sebagai kepala negaranya pada

bulan Januari 1979. Pembentukan pemerintahan baru ini ditentang oleh sebagian besar kelompok kekuatan yang kemudian membentuk kelompok perlawanan yang dikenal sebagai *Coalition Government of Democratic Kampuchea (CGDK)*. Munculnya Heng Samrin dan intervensi Vietnam ke Kamboja menimbulkan masalah semakin berkepanjangan bahkan semakin kompleks setelah banyak negara terlibat di dalam konflik Kamboja tersebut.

Berbagai upaya perdamaianpun dilakukan atas prakarsa dari Indonesia, ASEAN dan Pemerintah Perancis, bahkan akhirnya PBB turun tangan menjalankan tugas-tugas administrasi suatu negara yang independen, yaitu *United Nation Transitional Authority in Cambodia (UNTAC)*. Politik luar negeri Indonesia bebas aktif kembali ditunjukkan melalui upaya penyelesaian konflik Kamboja melalui perundingan. Indonesia memfasilitasi pertemuan dengan mengundang semua faksi yang ada di Kamboja untuk berunding di Jakarta atau *Jakarta Informal Meeting*. Pertemuan ini berlangsung beberapa kali antara tahun 1988 sampai 1990.

*Jakarta Informal Meeting* dilaksanakan pada bulan Juli 1988. Pertemuan ini untuk pertama kalinya berhasil mengundang masing-masing faksi yang bertikai di Kamboja untuk berunding. Pihak-pihak yang terlibat konflik serta pihak mediator mengirimkan delegasinya. Indonesia diwakili oleh Mochtar Kusumaatmadja, Pemerintah Koalisi Demokratik Kamboja diwakili oleh Norodom Sihanouk, pemerintah Vietnam diwakili oleh Nguyen Co Thach dan Republik Rakyat Kamboja diwakili oleh Hun Sen. Dalam pertemuan tersebut, Norodom Sihanouk mengusulkan tiga tahap rencana penyelesaian Perang Indocina III, antara lain: melakukan gencatan senjata antara kedua belah pihak, diturunkannya pasukan penjaga perdamaian PBB untuk mengawasi penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja, dan penggabungan semua kelompok bersenjata Kamboja ke dalam satu kesatuan.



Gambar 14.2.13 Tugu Persahabatan RI-Kamboja di Kampong Thom  
Sumber : <https://disk.mediaindonesia.com>

*Jakarta Informal Meeting II* dilaksanakan pada bulan Februari 1989. Pada pertemuan kedua ini, Australia turut ikut serta dengan diwakili oleh Menteri Luar Negeri, Gareth Evans, yang mengusulkan rancangan *Cambodia Peace Plan* yang berisi: mendorong upaya gencatan senjata, menurunkan pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah yang konflik, dan mendorong pembentukan pemerintah persatuan nasional untuk menjaga kedaulatan Kamboja sampai pemilihan umum diadakan. *Jakarta Informal Meeting III* dilaksanakan pada bulan Februari 1990. Pertemuan ketiga ini membahas mengenai pengaturan pembagian kekuasaan di antara pihak Pemerintah Koalisi Demokratik Kamboja dengan Republik Rakyat Kamboja dengan membentuk *Supreme National Council (SNC)* sebagai badan tertinggi di Kamboja. Kesepakatan lain sebagai hasil dari pertemuan ini, antara lain penarikan seluruh kekuatan asing dari Kamboja, akan diselenggarakan pemilu di bawah pengawasan PBB, pengawasan pelaksanaan HAM, dan pemulangan pengungsi Kamboja.

Konflik Kamboja menjadi perhatian internasional sehingga berbagai upaya perdamaian juga diupayakan. Perundingan internasional dilaksanakan di Paris dan dihadiri wakil dari 20 negara, termasuk ASEAN dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Konferensi ini disebut dengan ICK (*International Conference on Kampuchea* atau Konferensi Internasional mengenai Kamboja). ICK diharapkan mampu membentuk sebuah badan yang mengawasi penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja dan melakukan perjanjian perdamaian. Setelah melalui berbagai perundingan maka pada tanggal 23 oktober 1991 dilanjutkan dengan konferensi internasional, yaitu *Paris Internasional Conference On Cambodia* yang menghasilkan Perjanjian Paris, yang berisi pembentukan pemerintahan transisi PBB di Kamboja atau *United Nation Transitional Authority in Cambodia (UNTAC)*. PBB juga memprakarsai gencatan senjata pihak-pihak yang bertikai dan mengirim pasukan pemeliharaan perdamaian ke Kamboja. Pada tahun 1993, Pangeran Norodom Sihanouk diangkat sebagai Raja dan kemudian diadakan pemilihan umum yang hasilnya adalah Norodom Ranariddh dan Hun Sen terpilih sebagai perdana menteri.

## PENUGASAN 14.2.1

Setelah tuntas mempelajari materi unit 14.2 'Dari Indonesia untuk Perdamaian Dunia', diharapkan Anda semakin memahami berbagai peran dan kontribusi Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia, baik melalui pembentukan organisasi kerja sama, menggalang suatu gerakan bersama, bahkan sampai memfasilitasi suatu perundingan. Adapun tugas yang harus Anda kerjakan adalah membuat sebuah artikel tentang peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok sebagai bentuk pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Selain dari modul ini, Anda dapat mencari sumber referensi lain untuk menambah wawasan dan memperkaya hasil tulisan Anda.

### ■ Tujuan

Melalui penugasan ini diharapkan Anda dapat:

1. Menggali data atau informasi dari berbagai sumber dan sekaligus dapat menemukan sumber yang dapat dipercaya (kredibel).
2. Mengolah data atau informasi dari berbagai sumber mengenai Gerakan Non Blok
3. Menganalisis peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok sebagai bentuk pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.

### ■ Media

Untuk memperlancar penyelesaian tugas ini, Anda diminta menyiapkan:

1. Kertas HVS kuarto atau folio bergaris.
2. Bahan bacaan lain berupa buku, majalah, artikel, surat kabar baik tercetak maupun tidak tercetak (penelurusan internet).
3. Aplikasi *WhatsApp* atau *e-mail*.

### ■ Langkah Penugasan

Untuk mengerjakan tugas ini, Anda dapat mengikuti langkah berikut ini:

1. Bacalah kembali materi Unit 14.2 Dari Indonesia untuk Perdamaian Dunia.
2. Untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan, cari dan baca artikel dari sumber lain (internet/buku yang relevan).
3. Tulislah artikel mengenai peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok sebagai bentuk pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.
4. Cantumkan sumbernya
5. Tulis atau ketik di kertas HVS Kuarto atau Folio Bergaris
6. Tugas diserahkan langsung pada Tutor atau kirim file dalam bentuk jpg/pdf/ms.word melalui WhatsApp atau e-mail pada Tutor.

## PENUGASAN 14.2.2

Pada penugasan kali ini, Anda diminta menganalisis makna Deklarasi Juanda sebagai bentuk Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Kedua dan menuliskannya dalam bentuk artikel. Selain dari modul ini, Anda dapat mencari sumber referensi lain untuk menambah wawasan dan memperkaya hasil tulisan Anda.

### ■ Tujuan

Melalui penugasan ini diharapkan Anda dapat:

1. Menggali data atau informasi dari berbagai sumber dan sekaligus dapat menemukan sumber yang dapat dipercaya (kredibel).
2. Mengolah data atau informasi dari berbagai sumber mengenai Deklarasi Juanda sebagai bagian dari kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif.
3. Menganalisis makna Deklarasi Juanda sebagai bentuk proklamasi kemerdekaan Indonesia kedua.

### ■ Media

Untuk memperlancar penyelesaian tugas ini, Anda diminta menyiapkan:

1. Kertas HVS kuarto atau folio bergaris.
2. Bahan bacaan lain berupa buku, majalah, artikel, surat kabar baik tercetak maupun tidak tercetak (penelusuran internet).
3. Aplikasi *WhatsApp* atau *e-mail*.

### ■ Langkah Penugasan

Untuk mengerjakan tugas ini, Anda dapat mengikuti langkah berikut ini:

1. Bacalah kembali materi Unit 14.2 Dari Indonesai untuk Perdamaian Dunia
2. Untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan, cari dan baca artikel dari sumber lain (internet/buku yang relevan).
3. Buatlah analisis makna Deklarasi Juanda sebagai proklamasi kemerdekaan Indonesia kedua.
4. Cantumkan sumbernya
5. Tulis atau ketik di kertas HVS Kuarto atau Folio Bergaris
6. Tugas diserahkan langsung pada Tutor atau kirim file dalam bentuk jpg/pdf/ms.word melalui *WhatsApp* atau *e-mail* pada Tutor.



## Rangkuman Mari Ingat Kembali

1. Konsepsi kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif pertama kali disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Drs. Mohammad Hatta berjudul “Mendukung di antara Dua Karang” pada tanggal 2 September 1948 dalam sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP).
2. Landasan Ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang dikembangkan dari sila-sila Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri.
3. Landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea pertama “*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*” dan alinea keempat “*....dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial....*”.
4. Tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdikan kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan, melindungi segenap lapisan bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi..
5. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950an lebih difokuskan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia. Termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia.
6. Dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia, Indonesia memainkan sejumlah peran penting dalam percaturan politik global, baik melalui organisasi regional maupun internasional.

## Saran Referensi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Buku Sejarah Indonesia Kelas XII*.  
Kontributor Naskah: Abdurakhman, Arif Pradono, Linda Sunarti dan Susanto Zuhdi.

## Soal Latihan

Setelah tuntas mempelajari modul 14 Menjalिन Persahabatan Dunia yang terdiri atas 2 unit, yaitu unit 14.1 dan 14.2, maka untuk menguji kompetensi, silakan Anda kerjakan soal pilihan gandadan soal uraian berikut ini!

### A. Soal Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat

1. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda sehingga menjadi salah satu kepentingan dalam politik luar negeri. Pernyataan ini menunjukkan dorongan utama suatu negara menjalin hubungan kerja sama dengan negara lain adalah untuk....
  - a. menegakkan perdamaian dunia
  - b. membina persahabatan antarnegara
  - c. menunjukkan negaranya memiliki kelebihan
  - d. memenuhi kebutuhan domestik
  - e. menghadapi ancaman negara adikuasa
2. Kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif berawal dari Konsepsi Wakil Presiden Republik Indonesia, Drs. Mohammad Hatta dalam pidatonya yang berjudul...
  - a. Mendayung di antara Dua Karang
  - b. Indonesia Menggugat
  - c. Politik Indonesia Bebas Aktif
  - d. Indonesia dalam Konstelasi Global
  - e. Politik Luar Negeri Indonesia
3. Landasan Ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah....
  - a. Pancasila
  - b. UUD 1945
  - c. Undang-Undang
  - d. Peraturan Pemerintah
  - e. Peraturan Presiden
4. Landasan Konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah....
  - a. Pancasila
  - b. UUD 1945
  - c. Undang-Undang
  - d. Peraturan Pemerintah
  - e. Peraturan Presiden
5. Latar belakang kebijakan politik luar negeri Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia didasarkan karena Inggris mendukung pembentukan negara baru yaitu....
  - a. negara Singapura
  - b. negara Federasi Malaysia
  - c. negara Borneo Utara
  - d. negara Sabah
  - e. negara Brunei Darussalam
6. Bentuk kerja sama yang dilakukan dua negara disebut kerja sama....
  - a. nasional
  - b. bilateral
  - c. regional
  - d. global
  - e. internasional
7. Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada awal masa pemerintahan Orde Baru lebih difokuskan untuk....
  - a. kemajuan negara Indonesia
  - b. hubungan dengan luar negeri
  - c. memobilisasi sumber dana
  - d. kerjasama militer
  - e. keamanan regional ASEAN
8. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 UUD 1945 maka perjanjian dengan negara lain merupakan kekuasaan dari....
  - a. DPR sebagai lembaga legislatif
  - b. Presiden dengan persetujuan MPR
  - c. Presiden dengan persetujuan DPR
  - d. DPR dengan persetujuan MPR
  - e. Menteri Luar Negeri sebagai pembantu presiden
9. Sejak awal berdirinya organisasi ini lebih memfokuskan kerjasama bidang sosial ekonomi dan budaya. Hal ini merupakan tujuan pembentukan...
  - a. OPEC
  - b. ASEAN
  - c. Gerakan Non Blok
  - d. Organisasi Konferensi Islam
  - e. SEATO

10. Syarat utama yang harus diwujudkan oleh suatu negara untuk dapat menempatkan perwakilan diplomatiknya di luar negeri adalah....
- menjadi anggota PBB
  - bersedia mendukung program-program PBB
  - mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya
  - mampu melaksanakan politik luar negerinya secara konsisten
  - adanya pengakuan kedaulatan baik secara *de facto* maupun secara *de jure*

## B. Soal Uraian

- Jelaskan makna bebas aktif dalam politik negeri Indonesia bebas aktif?
- Sebutkan 3 contoh peran nyata Indonesia dalam melakukan hubungan internasional sebagai bentuk pelaksanaan politik luar negeri Indonesia bebas aktif? Jelaskan!
- Jelaskan makna Indonesia menjalin hubungan internasional merupakan wujud pengamalan Pancasila terutama sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif?
- Lakukan analisis apabila suatu negaramisalnya Indonesia tidak menjalin hubungan dengan negara lain?
- Jelaskan peran Indonesia dalam penyelesaian Krisis Suez dan kaitan antara hubungan diplomatik Indonesia-Mesir?



## Penilaian

### Rubrik Penilaian, Kunci Jawaban dan Pembahasan, Tindak Lanjut

#### Penugasan 14.1.1

##### ■ Penilaian

Penugasan 14.1.1 adalah kegiatan menulis artikel mengenai makna persahabatan dikaitkan dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang dilaksanakan Indonesia. Kriteria penilaian tulisan artikel yang baik paling tidak dapat dilihat dari 3 (tiga aspek), yaitu relevansi, kelengkapan, dan kebahasaan.

- Relevansi merujuk pada ketepatan fakta yang ditulis sesuai dengan informasi yang dibutuhkan.
- Kelengkapan merujuk pada informasi ditulis sesuai dengan fokus tulisan yang diminta.
- Kebahasaan merujuk pada penggunaan bahasa, kalimat dan kata-kata yang efektif dan sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang benar (tata kata atau tata kalimat yang benar dan mudah dipahami).

##### ■ Rubrik Penilaian

No	Aspek yang dinilai	Skor			
		4	3	2	1
1	Relevansi				
2	Kelengkapan				
3	Kebahasaan				
<b>Skor Perolehan</b>					

Keterangan Skor:

- 4 : bila aspek sangat relevan/sangat lengkap/sangat jelas dan sangat mudah dipahami  
 3 : bila aspek cukup relevan/cukup lengkap/cukup jelas dan mudah dipahami  
 2 : bila aspek kurang relevan/kurang lengkap/kurang jelas dan cukup mudah dipahami  
 1 : bila aspek tidak relevan/tidak lengkap/tidak jelas dan sulit dipahami

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

##### ■ Kunci Jawaban dan Pembahasan

Artikel tentang hubungan antara makna persahabatan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif.

- Makna persahabatan.  
Sebuah hubungan dikatakan persahabatan jika memiliki ciri-ciri, antara lain adanya saling menyayangi dan berbagi, saling setia, jujur dan kerjasama yang baik. Menurut KBBI dan pengertian umum ada perbedaan antara 'Sahabat' dan 'Teman' atau 'Kawan'. Sahabat adalah orang yang selalu merasakan suka duka yang di alami oleh seorang sahabatnya, sedangkan teman atau kawan adalah orang yang tidak terlalu dekat dengan kita, bias saja karena hanya bertatap muka satu kali atau dua kali lalu kita bisa menyebutnya sebagai teman.

Dalam memilih teman hendaknya memang harus diperhatikan dengan baik. Karena lingkungan pergaulan yang anda pilih akan menentukan perkembangan diri anda sendiri tentunya. Lingkungan yang baik akan menciptakan pribadi baik dan sebaliknya lingkungan yang buruk akan menciptakan pribadi buruk tentunya.

- Makna Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif.  
Politik luar negeri adalah kebijakan politik yang dijalankan oleh suatu pemerintahan dalam kaitannya dengan hubungan antarnegara/pemerintah sebagai bagian dari hubungan internasional. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Memuat kata Bebas dan Aktif, dimana makna Bebas adalah bebas menentukan bangsa atau negara mana yang akan dijadikan sebagai sahabat, dan dalam konteks lebih luas adalah tidak berpihak pada salah satu negara manapun meskipun negara tersebut memiliki kekuatan lebih. Dalam hal ini Indonesia menjadi negara yang netral dan akan melakukan hubungan dengan negara lain selama hubungannya dilakukan dengan prinsip saling percaya, jujur, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Makna aktif dalam konteks politik luar negeri adalah bahwa Indonesia senantiasa ikut berpartisipasi dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Indonesia senantiasa akan menjalin hubungan kerja sama dengan negara lain, bahkan Indonesia akan berpartisipasi menciptakan perdamaian dunia tanpa diminta atau diajak oleh negara atau lembaga dunia.
- Pembahasan  
Bebas Aktif dalam hal ini adalah bahwa bangsa Indonesia merdeka dalam menentukan arah dan sikapnya sebagai sebuah negara tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari (kebijakan) negara lainnya di dunia.

### Penugasan 14.1.2

#### Penilaian

Penugasan 14.1.2 terdiri atas 2 jenis, yaitu melakukan analisis perbandingan kebijakan politik luar negeri dan menjawab pertanyaan.

- A. Penilaian untuk kegiatan menganalisis perbandingan kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan masa pemerintahan Orde Baru. Perbandingan dilakukan dengan melihat dari unsur kekuatan dan kelemahan dari kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif yang dijalankan masing-masing pemerintahan, serta dilengkapi dengan simpulannya. Deskripsi masing-masing unsur, yaitu kekuatan, kelemahan, dan simpulan akan dinilai berdasarkan 3 (tiga) kriteria penulisan, yaitu relevansi, kelengkapan, dan kebahasaan.

#### ■ Rubrik Penilaian

Kriteria ini digunakan untuk menilai deskripsi hasil analisis dari masing-masing unsur (kekuatan, kelemahan, dan simpulan) untuk kedua periode pemerintahan tersebut.

No	Aspek yang dinilai	Skor			
		4	3	2	1
1	Relevansi				
2	Kelengkapan				
3	Kebahasaan				
<b>Skor Perolehan</b>					

Keterangan Skor:

- 4 : bila aspek sangat relevan/sangat lengkap/sangat jelas dan sangat mudah dipahami
- 3 : bila aspek cukup relevan/cukup lengkap/cukup jelas dan mudah dipahami
- 2 : bila aspek kurang relevan/kurang lengkap/kurang jelas dan cukup mudah dipahami
- 1 : bila aspek tidak relevan/tidak lengkap/tidak jelas dan sulit dipahami

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

- B. Penilaian pertanyaan

1. Sebutkan syarat terbentuknya suatu negara? Jelaskan hubungannya dengan politik luar negeri Indonesia bebas aktif?

#### ■ Rubrik Penilaian:

Skor	Kriteria
Skor 3	Menjawab 3 syarat dengan benar
Skor 2	Menjawab 2 syarat dengan benar
Skor 1	Menjawab 1 syarat dengan benar

2. Jelaskan manfaat kerja sama antarnegara sebagai bagian dari politik luar negeri suatu negara?

Skor	Kriteria
Skor 3	Menjawab 3 syarat dengan benar
Skor 2	Menjawab 2 syarat dengan benar
Skor 1	Menjawab 1 syarat dengan benar

Perhitungan Nilai Penugasan 14.1.2 adalah gabungan dari perolehan Nilai Hasil Analisis Perbandingan ditambah perolehan Nilai Pertanyaan, dengan rumus berikut:

$$\text{Nilai Tugas 14.1.2} = \frac{(\text{Nilai Tulisan Artikel}) + (\text{Jumlah Nilai Pertanyaan})}{12 + 6} \times 100$$

#### ■ Kunci Jawaban dan Pembahasan

Penugasan 14.1.2 membuat analisis perbandingan kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan masa pemerintahan Orde Baru.

No.	Aspek	Masa Demokrasi Terpimpin	Masa Orde Baru
1	Kekuatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan luar negeri Indonesia termasuk politik luar negeri bersifat militan atau konfrontasi dalam melawan semua bentuk imperialisme, kolonialisme, dan khususnya neo-kolonialisme, antara lain perjuangan merebut Irian, menentang berdirinya Federasi Malaysia sebagai bentuk neokolonialisme Inggris</li> <li>Menganggap Indonesia dan negara-negara yang baru merdeka (Nefo) sebagai kekuatan baru yang patut di perhitungkan pada kancah politik dunia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normalisasi Hubungan dengan negara lain: antara lain mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia dan menjalin hubungan dengan Singapura.</li> <li>Ikut Membentuk ASEAN</li> <li>Integrasi Timor Timur</li> <li>Kembali menjadi anggota PBB</li> <li>Mengirim misi Garuda</li> <li>Mediasi konflik Kamboja (JIM)</li> <li>Keterlibatannya dalam berbagai organisasi internasional. (ASEAN dan PBB, IGGI/CGI, APEC, OPEC, dan lain-lain).</li> </ul>
2	Kelemahan	<p>Penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 termasuk juga politik luar negeri Indonesia. Berikut beberapa penyimpangan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin yang harus dipahami.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan luar negeri tidak lagi netral karena cenderung ke negara-negara komunis, dan puncaknya yaitu saat Indonesia semakin mendekati kepada Cina pada tahun 1964-1965</li> <li>pembagian kekuatan politik dunia menjadi dua yakni Nefo (<i>New Emerging Forces</i>) dan <i>Oldefo</i> (<i>Old Established Forces</i>)</li> </ul>	<p>Hampir tidak ada kelemahan pada kebijakan politik luar negeri karena semua kebijakan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Namun di sisi lain muncul ketidakpuasan masyarakat terhadap kekuasaan pemerintah sangat kuat karena timbulnya penyelewengan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Praktik KKN (korupsi kolusi dan nepotisme).</li> <li>Pengekangan kebebasan pers dan berpendapat.</li> <li>Pembangunan hanya berpusat di ibu kota (Jawa)</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan poros Jakarta – Peking</li> <li>politik mercusuar melalui pembangunan infrastruktur ambisius yang dilakukan di Jakarta, serta penyelenggaraan Ganefo untuk menyaingi Olimpiade/Asian Games 1962</li> <li>Indonesia keluar dari PBB</li> <li>Konfrontasi Malaysia (Dwikora)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)</li> <li>Hubungan dengan negara-negara komunis tidak terlalu baik karena cenderung mengarah kepada negara-negara Barat.</li> </ul>
3	Simpulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintahan Demokrasi terpimpin dimulai sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai 1965.</li> <li>Penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945</li> <li>Fokus kebijakan politik masa Demokrasi Terpimpin pada bidang politik.</li> <li>Persamaan: Kekuasaan sentralistik ada di tangan presiden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah Orde Baru dimulai sejak adanya Supersemar dan pengangkatan Soeharto sebagai Plt. Presiden sampai munculnya Reformasi.</li> <li>Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen</li> <li>Fokus kebijakan politik Orde Baru ke bidang ekonomi (pembangunan)</li> <li>Persamaan: Kekuasaan sentralistik ada di tangan presiden.</li> </ul>

#### Soal Pertanyaan:

1. Syarat terbentuknya suatu negara dan hubungannya dengan politik luar negeri Indonesia bebas aktif.

Ada 3 syarat berdirinya suatu negara, yaitu rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Pada dasarnya yang utama adalah rakyat, wilayah dan pemerintahan, namun perlu dipertegas dengan syarat keempat yaitu pengakuan dari negara lain yang sudah merdeka. Pengakuan dari negara lain menjadi kriteria penting dalam hubungan antarnegara karena adanya saling ketergantungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini lah yang melandasi perlunya menetapkan kebijakan politik luar negeri yang sesuai dengan jati diri bangsa, yaitu bebas aktif.

2. Manfaat kerja sama antarnegara sebagai bagian dari politik luar negeri suatu negara  
Salah satu tujuan politik luar negeri adalah menjalin kerja sama antarnegara yang diharapkan akan mendatangkan manfaat dan keuntungan kedua belah pihak, sehingga masing-masing dapat:
  - meningkatkan kemajuan di berbagai bidang.
  - mengatasi berbagai masalah kebutuhan domestik, misalnya masalah pangan, pemberantasan penyakit, dan lain-lain.
  - menghilangkan sifat permusuhan antarbangsa dan meredakan ketegangan dunia.
  - menciptakan kedekatan hubungan bilateral, regional, dan internasional.

## Penugasan 14.2.1

### ■ Penilaian

Penugasan 14.2.1 adalah kegiatan menulis artikel mengenai peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok sebagai bentuk pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Kriteria penilaian tulisan artikel yang baik paling tidak dapat dilihat dari 3 (tiga aspek), yaitu relevansi, kelengkapan, dan kebahasaan.

1. Relevansi merujuk pada ketepatan fakta yang ditulis sesuai dengan informasi yang dibutuhkan.
2. Kelengkapan merujuk pada informasi ditulis sesuai dengan fokus tulisan yang diminta.
3. Kebahasaan merujuk pada penggunaan bahasa, kalimat dan kata-kata yang efektif dan sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang benar (tata kata atau tata kalimat yang benar dan mudah dipahami).

### ■ Rubrik Penilaian

No	Aspek yang dinilai	Skor			
		4	3	2	1
1	Relevansi				
2	Kelengkapan				
3	Kebahasaan				
<b>Skor Perolehan</b>					

Keterangan Skor:

- 4 : bila aspek sangat relevan/sangat lengkap/sangat jelas dan sangat mudah dipahami
- 3 : bila aspek cukup relevan/cukup lengkap/cukup jelas dan mudah dipahami
- 2 : bila aspek kurang relevan/kurang lengkap/kurang jelas dan cukup mudah dipahami
- 1 : bila aspek tidak relevan/tidak lengkap/tidak jelas dan sulit dipahami

### ■ Kunci Jawaban dan Pembahasan

Artikel tentang peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok sebagai bentuk pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.

#### • Peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok

Indonesia merupakan salah satu pendiri Gerakan Non Blok bersama beberapa negara lainnya, seperti India, Yugoslavia, dan Mesir. Terlebih munculnya Gerakan Non Blok sudah dimulai sejak penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika dengan Dasasila Bandung. Semangat Bandung mendorong negara-negara di Asia, Afrika,

Amerika Latin, dan kawasan lainnya berkomitmen untuk mewujudkan suatu gerakan yang tidak berpihak dengan salah satu blok kekuatan dunia saat itu dan masih bertahan hingga sekarang.

- Indikator pelaksanaan politik luar negeri Indonesia bebas aktif, antara lain:
  - Indonesia tidak berpihak pada salah satu blok kekuatan yang ada (Blok Barat atau Blok Timur)
  - Indonesia bebas menjalin hubungan diplomasi dengan negara lain dengan ketentuan saling menguntungkan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing
  - Indonesia bebas memilih untuk bergabung dengan organisasi regional atau internasional sesuai hukum internasional
  - Indonesia baik sendiri maupun dengan negara/organisasi senantiasa aktif dalam mewujudkan perdamaian di kawasan regional dan internasional
  - Indonesia akan berperan aktif dalam penyelesaian konflik/pertikaian dimanapun melalui jalur diplomasi.

### ■ Pembahasan

Hubungan antara Gerakan Non Blok dengan politik luar negeri bebas aktif adalah bahwa GNB merupakan wujud nyata komitmen Indonesia untuk tidak memihak blok kekuatan manapun di dunia waktu itu. Komitmen Indonesia ini menjadi salah satu bentuk penerapan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Indonesia bersama semua anggota GNB sepakat dan berkomitmen untuk tidak beraliansi dengan blok barat atau blok timur namun akan lebih fokus pada perjuangan dalam menentang kolonialisme, rasisme, imperialisme, dan lain sebagainya.

## Penugasan 14.2.2

### ■ Penilaian

Penugasan 14.2.1 adalah menganalisis makna Deklarasi Juanda sebagai bentuk Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Kedua dan menuliskannya dalam bentuk artikel. Kriteria penilaian tulisan artikel yang baik paling tidak dapat dilihat dari 3 (tiga aspek), yaitu relevansi, kelengkapan, dan kebahasaan.

1. Relevansi merujuk pada ketepatan fakta yang ditulis sesuai dengan informasi yang dibutuhkan.
2. Kelengkapan merujuk pada informasi ditulis sesuai dengan fokus tulisan yang diminta.
3. Kebahasaan merujuk pada penggunaan bahasa, kalimat dan kata-kata yang efektif dan sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang benar (tata kata atau tata kalimat yang benar dan mudah dipahami).

## ❖ Rubrik Penilaian

No	Aspek yang dinilai	Skor			
		4	3	2	1
1	Relevansi				
2	Kelengkapan				
3	Kebahasaan				
Skor Perolehan					

Keterangan Skor:

- 4 : bila aspek sangat relevan/sangat lengkap/sangat jelas dan sangat mudah dipahami
- 3 : bila aspek cukup relevan/cukup lengkap/cukup jelas dan mudah dipahami
- 2 : bila aspek kurang relevan/kurang lengkap/kurang jelas dan cukup mudah dipahami
- 1 : bila aspek tidak relevan/tidak lengkap/tidak jelas dan sulit dipahami

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

### ■ Kunci Jawaban dan Pembahasan

Artikel tentang makna Deklarasi Juanda sebagai bentuk Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Kedua.

Kata kunci dalam melakukan studi analisis ini adalah **wilayah negara**, dimanasesuai dengan hukum internasional terkait dengan syarat berdirinya suatu negara merdeka, antara lain: wilayah, rakyat, pemerintahan, dan pengakuan dari negara lain.

#### • Wilayah Negara Republik Indonesia menurut Proklamasi Kemerdekaan

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 menetapkan wilayah negara Indonesia adalah semua bekas wilayah Hindia Belanda. Padahal wilayah Hindia Belanda mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu *Teritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* 1939 (TZMKO 1939). Berdasarkan peraturan ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan masing-masing pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Dalam hal ini, wilayah Indonesia terdiri atas wilayah daratan dari masing-masing pulau dan wilayah laut hanya sejauh 3 mil dari masing-masing pulau. Artinya wilayah Indonesia dipisah-pisahkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain, dimana didalamnya ada laut bebas. Dengan demikian kedaulatan Indonesia hanya atas pulau sedangkan laut hanya sebatas 3 mil dari pulau masing-masing.

#### • Wilayah Negara Republik Indonesia menurut Deklarasi Juanda

Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (*Archipelagic State*) sehingga laut-laut antarpulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Penetapan wilayah negara Indonesia sesuai Deklarasi Juanda ini tentu saja mendapat protes dan penentangan dari negara lain. Perjuangan dalam penetapan wilayah negara Indonesia ternyata melalui perjalanan panjang dan baru diakui oleh hukum internasional melalui Konvensi Hukum Laut PBB ke-III Tahun 1982 (*United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982*). Pemerintah Indonesia menegaskan konvensi hukum laut dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 yang intinya penegasan Indonesia adalah negara kepulauan.

### ■ Pembahasan

Dengan demikian, melalui Deklarasi Juanda dan perjuangan diplomasi internasional akhirnya negara Republik Indonesia memperoleh pengesahan atas status dan wilayah negara kepulauan. Wilayah laut bukan lagi menjadi pemisah wilayah antarpulau namun justru laut mempersatukan wilayah pulau-pulau di Nusantara.

## Kunci Jawaban Soal Latihan

### A. Pilihan Ganda

- |      |       |
|------|-------|
| 1. D | 6. B  |
| 2. A | 7. C  |
| 3. A | 8. C  |
| 4. B | 9. B  |
| 5. B | 10. E |

### B. Soal Uraian

1. Bebas artinya tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang ada di dunia. Tidak berpihak kepada kekuatan yang dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Indonesia bebas berhubungan dengan negara manapun. Aktif artinya turut serta dalam kegiatan-kegiatan internasional dalam rangkamewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2. Peran nyata Indonesia dalam hubungan internasional sebagai bentuk pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, antara lain:
  - Indonesia memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung 24 April 1955,
  - Indonesia memprakarsai berdirinya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok,
  - Indonesia mengirimkan pasukan pemeliharaan perdamaian di bawah naungan PBB
  - Indonesia memprakarsai berdirinya Gerakan Non Blok (GNB) pada tahun 1961,
  - Indonesia memfasilitasi perundingan perdamaian, misalnya penyelenggaraan *Jakarta Informal Meeting I, II, dan III*.
3. Pancasila merupakan landasan ideologi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Hubungan internasional merupakan salah satu bentuk pelaksanaan politik luar negeri. Oleh karena itu, pelaksanaan hubungan internasional senantiasa dilandasi sila-sila Pancasila terutama sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dengan demikian Indonesia akan melakukan hubungan internasional dengan negara manapun asal dilandasi dengan sikap:
  - saling menghormati ideologi masing-masing bangsa dan negara
  - saling menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah masing-masing negara
  - tidak melakukan campur tangan dalam urusan dalam negeri bangsa dan negara lain
  - tidak menyinggung perasaan bangsa dan negara lain
  - menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan diri
  - tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi atau penggunaan kekerasan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara
4. Jika suatu negara tidak menjalin hubungan dengan negara lain maka negara tersebut akan mengalami beberapa kerugian dan akan berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Jika Indonesia tidak menjalin hubungan dengan negara lain maka akan mengalami beberapa kerugian, antara lain:
  - keberadaan negara akan dikucilkan dari pergaulan internasional
  - kebutuhan warga negara yang tidak tersedia di dalam negeri tidak dapat terpenuhi
  - tidak dapat melindungi bila ada warga negara Indonesia berada di negara lain
  - tidak mengetahui kejadian atau perkembangan negara lain di dunia
  - dan lain-sebagainya

5. Krisis Suez bermula dari nasionalisasi Terusan Suez oleh Presiden Mesir kemudian diikuti dengan serangan militer gabungan Inggris, Perancis dan Israel terhadap Mesir. Serangan ini menimbulkan konflik militer berskala besar atau Krisis Suez dan tentunya memerlukan perhatian internasional. Melihat Mesir sebagai negara sahabat sedang menghadapi masalah tersebut mendorong Indonesia melalui mekanisme diplomasi internasional meminta PBB untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke kawasan krisis tersebut. Pasukan pemeliharaan perdamaian (*United Nations Emergency Force/UNEF*) dari PBB akhirnya dikirim ke Mesir, dimana pasukan dari Indonesia menjadi bagian di dalamnya. Krisis Suez berakhir setelah PBB memberikan izin pengelolaannya ke Mesir pada April 1957.

Hubungan istimewa Indonesia-Mesir.

Pada saat Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Mesir segera bersidang dengan negara-negara Liga Arab dan hasilnya adalah mengakui kemerdekaan Indonesia pada 18 November 1946. Pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari negara lain pertama kali berasal dari Mesir dan negara-negara Liga Arab sehingga pengakuan de jure ini merupakan bukti berdasarkan hukum hubungan internasional.

## Kriteria Penilaian Soal Latihan

### A. Pilihan Ganda

1. Jawaban benar, Skor : 1 X 10 soal = 10
2. Jawaban salah, Skor : 0 X 10 soal = 0
3. Skor maksimal = 10

## B. Soal Uraian

No. Soal	Perolehan Skor Setiap Jawaban					Skor Maksimal
	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1	
	jika jawaban benar dan sangat lengkap	jika jawaban benar dan cukup lengkap	jika jawaban benar namun kurang lengkap	Jika jawaban tidak lengkap	jika jawaban salah	
1.						5
2.						5
3.						5
4.						5
5.						5
<b>Jumlah Skor Maksimal</b>						<b>25</b>

$$\text{Nilai Soal Latihan Anda} = \frac{(\text{Skor Pilihan Ganda}) + (\text{Skor Uraian})}{35} \times 100$$



## Kriteria Pindah / Lulus Modul

Setelah Anda mengerjakan soal latihan, selanjutnya cocokkan dengan kunci jawaban yang sudah tersedia, atau diskusikan dengan tutor. Lakukan penilaian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hitung jumlah skor yang Anda peroleh dari soal pilihan ganda, skor maksimal adalah 10
2. Hitung jumlah skor yang Anda peroleh dari soal uraian, skor maksimal adalah 25

Untuk mengetahui ketuntasan belajar Anda hitunglah tingkat penguasaan materi Anda dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Ketuntasan} = \frac{(\text{Skor Pilihan Ganda}) + (\text{Skor Uraian})}{35} \times 100$$

Batas ketuntasan minimal adalah 75%. Jika pencapaian ketuntasan Anda 75% ke atas, maka Anda dinyatakan TUNTAS. Lanjutkan untuk mempelajari modul berikutnya.

Sebaliknya, jika pencapaian ketuntasan Anda kurang dari 75%, maka Anda dinyatakan BELUM TUNTAS. Ulangi untuk mempelajari modul, terutama pada unit yang memperoleh nilai belum tuntas dan ulangi mengerjakan latihan soal, terutama yang Anda jawab belum betul sampai Anda mampu menjawabnya dengan betul.

Jika pengulangan Anda telah mencapai batas minimal ketuntasan, silahkan untuk melanjutkan mempelajari modul berikutnya.

## Daftar Pustaka

- Abdulgani, Roelan, Dr.H. (1971).25 Tahun Indonesia – PBB.Djakarta
- Abdullah, Taufik. Ed.(2012). Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional. Bagian I: Rekonstruksi dalam Perdebatan, Jakarta, Yayasan Obor.
- Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. (2011).Atlas Nasional Indonesia: Sejarah, Wilayah, Penduduk, dan Budaya.
- Cipto, Bambang. 2007.Hubungan Internasional di Asia Tenggara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwipayana.G dan Ramadhan K. H. 1989.Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya (Autobiografi Presiden Soeharto). Jakarta: PT. Citra Lamtoro Gung Persada.
- Feith, H. dan Castles, L. (1970), Indonesia Political Thinking, 1945 – 1965, New York, Ithaca.
- Feith, Herbert, “Pemikiran Politik Indonesia 1945 – 1965; Suatu Pengantar”, dalam Miriam Budiardjo, (1998). Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta: Yayasan Obor Jakarta – Kuala Lumpur: Equinox Publishing.
- Girsang, Laidin. (1979).Indonesia sejak Orde Baru, Jakarta: Yayasan Lalita.
- Hatta, Mohammad, (1948). “Mendayung Antara Dua Karang: Keterangan Pemerintah tentang Politiknya kepada Pekerja K.N.P.2 September 1948”, dalam Sejarah Asal Mula Rumusan Haluan Politik Luar Negeri Bebas Aktif, hlm 12-65.
- Kementerian Luar Negeri. (2004). Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa, Jakarta: Kemenlu.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2003). Materi Pelatihan Guru dalam Implementasi Kurikulum (2013) SMA dan SMK/MAK Sejarah Indonesia. Jakarta BPSDM.PMK.
- Mashad, Dhurorudin. 2008. “Politik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi”, dalam: Ganewati Wuryandari (eds), Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik. Jakarta: P2P LIPI dan Pustaka Pelajar.

## GLOSARIUM

- Dekolonisasi : Lepasnya negara-negara jajahan dari negara penjajah
- Good Offices* : Tindakan pihak ketiga yang membawa kearah negosiasi atau yang memberi fasilitas kearah terselenggaranya negosiasi.
- Konfrontasi : Konflik; permusuhan; pertentangan;  
cara menentang musuh atau kesulitan dengan berhadapan langsung atau terang-terangan. Misalnya konfrontasi Indonesia dan Malaysia
- Kronologis : Urutan sebuah kejadian
- NEFOS (New Emerging Forces)* : Kelompok negara-negara berkembang yang anti imperialis dan kolonialis
- Neo Kolonialisme : Penjajahan baru
- Old Estabes Forces (OLDEFOS)* : Kelompok negara-negara imperialis/ kolonialis kapitalis dan negara-negara berkembang yang cenderung pada kelompok imperialis/ kolonialis
- Operasional : Konsep yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran suatu variable
- Perang Dingin : Situasi politik dunia yang terjadi karena adanya perseteruan duaideologi dari dua negara adi kuasa yaitu Amerika Serikat yang mewakili Blok Barat dan Uni Soviet yang mewakili Blok Timur
- Politik Mercusuar : Kebijakan politik yang diterapkan Soekarno pada masa-Demokrasi Terpimpin yang ingin menunjukkan kemegahan di tengah pergaulan antarbangsa.
- Prioritas : Diutamakan
- Reformasi : Suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional

# TENTANG PENULIS



Nama Lengkap : **Dra.Rukayah,**

Telepon Kantor : 027448367,

Nomor HP : 085277427784,

e-mail : rukayah60@gmail.co.id.

Alamat Kantor : Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas DIY, Jln Sorowajan Baru  
No. 1, Banguntapan, Bantul Yogyakarta.

Pendidikan : Sarjana Fakultas Pendidikan dan Kejuruan, Jurusan Pendidikan Luar  
Sekolah (PLS) di Universitas Syiah Kuala tahun 1988.

## Riwayat pekerjaan :

1. Pamong Belajar(SK B) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh,
2. Pengelola Paud Walidun Bahri, di Desa Tibang Kota Banda Aceh
3. Pengelola PKBM Tgk Syeh Abdurrauh di Desa Tibang Kota Banda Aceh,
4. Pengelola Paket A di SKB Kota Banda Aceh
5. Pengelola Yayasan Al-Iqra, di Desa Blang Kruen Kab Aceh Besar
6. Pengelola Paud Melati di Desa Blang Krueng Kab. Aceh Besar
7. Ketua Gugus Paud/TK di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar
8. Ketua Pos KB Gampong di Desa Blang Krueng Kab Aceh Besar,
9. Bekerja sama dengan Jepang saat terjadi Gempa dan Stunami di Provinsi Aceh, dan
10. pada tahun 2016 pindah tugas ke Balai Pengembangan Belajar (BPKB) DIY yang sekarang berubah menjadi Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Pamong Belajar.